



# L K I P

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**bnn**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Palapa No.1A Oebobo Kota Kupang  
email: [bnnpntt@yahoo.co.id](mailto:bnnpntt@yahoo.co.id)

**WAR ON  
DRUGS**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022** dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas Pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Wilayah, telah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam implementasi program dan kegiatan mengacu pada rencana strategis lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sebagai gambaran bahwa capaian sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan, di sisi lain, masih terdapat target kinerja yang belum tercapai secara optimal. Keberhasilan dan belum optimalnya pencapaian target dimaksud akan dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Selain itu, rekomendasi yang akan dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan P4GN dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selaku Plt.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan



laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua, Amin.

Kupang, 31 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Mohammad Nasrun M.,S.H.,M.H.**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64, telah mengamanatkan tentang pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, menetapkan 3 (tiga) Bidang sebagai pilar utama yakni Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah.

Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi sebagai berikut:

|      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI | MEWUJUDKAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TERLINDUNG DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki misi sebagai berikut :

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI | <ol style="list-style-type: none"><li>1. MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA PROFESIONAL.</li><li>2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA.</li><li>3. MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN.</li></ol> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :



## TUJUAN

1. MELINDUNGI DAN MENYELAMATKAN MASYARAKAT DARI PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.

Sedangkan Sasaran strategis Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan Proporsional serta berkinerja Tinggi

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan, 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja dan 17 (tujuh belas) target kinerja yang didukung dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) indikator Output Kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, dapat diringkas sebagai berikut :

1. IKK jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pengembangan Keterampilan Hidup (softskill) di SMP dan SMU sederajat dengan target output 1 lembaga dengan realisasi output 1 lembaga atau sebesar 100%, melalui kegiatan Pelatihan Softskill di SMP dan SMU Sederajat dan Informasi dan Edukasi melalui Dialog Interaktif Remaja / Teman sebaya dengan target 10 orang realisasi 10 orang atau sebesar 100%. Realisasi kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba di Wilayah Provinsi NTT, berkategori “Sangat Tinggi”, berjumlah 1 Kab/Kota yaitu Kabupaten Belu , kategori “Tinggi” berjumlah 1 Kab/Kota yaitu Kota Kupang , dan 1 Kab/Kota dengan kategori “Rendah” yaitu Kabupaten Rote Ndao, dengan persentase capaian kinerja sebesar 66,67% dibawah target kinerja yang ditetapkan. Untuk mendukung IKK



tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kepada 10 keluarga dengan capaian realisasi output 10 keluarga atau sebesar 100% melalui Asistensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba dan kegiatan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa pada 2 desa dengan realisasi output 2 desa atau sebesar 100%.

2. IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kepada 10 keluarga dengan capaian realisasi output 10 keluarga atau sebesar 100% melalui Asistensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba dan kegiatan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa pada 2 desa dengan realisasi output 2 desa atau sebesar 100%. Realisasi kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi NTT berjumlah 1 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Rote Ndao, dan 2 Kab/Kota lainnya berkategori "Rendah" yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Belu, dengan persentase capaian kinerja sebesar 33.30 % dibawah target kinerja yang ditetapkan.
3. IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba masing-masing 2 lembaga yaitu Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Kelompok Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan dengan realisasi output masing-masing 2 lembaga atau sebesar 100%. Realisasi kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi berjumlah 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
4. IKK Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga" target kinerja 1 kawasan. Untuk mendukung IKK



- tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika pelatihan *life skill* pada 1 Kelompok Masyarakat dengan realisasi output 1 Kelompok Masyarakat atau sebesar 100%. Realisasi kinerja Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga" 1 kawasan atau sebesar 100% sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
5. IKK Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi target kinerja 2.99 Indeks dengan realisasi kinerja Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar 3.20 atau sebesar 107.02 % melebihi dari target kinerja yang ditetapkan.
  6. IKK Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target kinerja 25 orang. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi melalui bimbingan teknis kepada 33 orang dengan realisasi output petugas yang diberikan peningkatan kompetensi teknis sebanyak 33 orang atau sebesar 132%. Realisasi kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebesar 33 orang dengan persentase capaian kinerja sebesar 132% melebihi target kinerja yang ditetapkan.
  7. IKK Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis target kinerja 10 orang. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan sertifikasi petugas rehabilitasi Konselor Adiksi kepada 10 orang. Realisasi kinerja Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis 5 orang dengan persentase capaian kinerja sebesar 50 %, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
  8. IKK Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi target kinerja 3 lembaga. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama. Realisasi kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi NTT dari 3 lembaga yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 3 Lembaga dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



9. IKK Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi target kinerja 5 unit. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Pembentukan unit IBM. Realisasi kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi sebesar 5 unit dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% , sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
10. IKK Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi target kinerja 3.1 indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama kepada masyarakat. Realisasi kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi NTT sebesar 3.553 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 114.61 %, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
11. IKK Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 target kinerja 5 berkas. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Realisasi kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 sebesar 0 berkas dengan persentase capaian kinerja sebesar 0 %, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
12. IKK Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100 realisasi 0. Realisasi kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebesar 0 dengan persentase capaian kinerja sebesar 0 %, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
13. IKK Nilai tingkat kemanan barang bukti narkotika dan non narkotika target 100. Realisasi kinerja Nilai tingkat kemanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar 0 dengan persentase capaian kinerja sebesar 0%, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
14. IKK Nilai Kinerja Anggaran target 91 indeks BNN . Sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja data *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur realisasi kinerja anggaran 87.44 Indeks atau sebesar 96.88%, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



15. IKK Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 3 BNN Kabupaten / Kota. Realisasi kinerja Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 1 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian kinerja sebesar 33,33 %, dibawah target kinerja yang telah ditetapkan.
16. IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target kinerja 95 Indeks . Sesuai dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, IKPA BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 97.66 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.59, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.
17. IKK Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, target 3 BNN Kabupaten / Kota. Realisasi kinerja Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target 3 BNN Kabupaten/Kota dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 %, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian IKK Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa IKK diatas target berjumlah 4 (empat), IKK sesuai target berjumlah 5 (lima) dan IKK dibawah target berjumlah 5 (lima) dan IKK tidak mencapai target berjumlah 3 (tiga), maka dapat direkomendasi langkah-langkah peningkatan kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya konsistensi dari pengambil kebijakan di daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD maupun seluruh stakeholder) untuk melaksanakan kebijakan P4GN tersebut, untuk diimplementasikan secara berkesinambungan.
2. Memaksimalkan capaian kinerja efektifitas diseminasi informasi P4GN dapat dilakukan dengan cara setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi, harus ada keinginan untuk turut berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran di lingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat. Perlu meningkatkan efektivitas media luar ruang untuk memberikan informasi atau pesan bahaya penyalahgunaan narkoba.



3. Perlu adanya peran aktif penggiat anti narkoba dalam mendukung program P4GN di lingkungan masyarakat setelah mengikuti pengembangan kapasitas.
4. Meningkatkan kesadaran untuk secara mandiri atau swadaya dalam menginisiasi masyarakat dan stakeholder guna memperoleh dukungan anggaran pelaksanaan program P4GN.
5. Perlu meningkatkan informasi kepada masyarakat mengenai program layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan layanan rehabilitasi komponen masyarakat (klinik pratama BNNP/BNNK, RSUD, puskesmas dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat).
6. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target dan mengevaluasi serta mengintensifikan kerjasama yang telah terjalin.
7. Meningkatkan pemetaan wilayah narkoba dan meningkatkan penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dalam rangka pengungkapan kasus penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perlu peningkatan kompetensi dan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan daftar susunan pegawai pada Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara, terutama yang berkaitan dengan personil Pemberantasan, Rehabilitasi, Analis Kesehatan, Keuangan, Perencanaan dan Penyuluh.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Terhindar dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkotika dalam rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, selaras dengan visi tersebut, BNN Propinsi Nusa Tenggara Timur berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN ; pelayanan administrasi BNNP; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP, sedangkan BNN Kabupaten dan Kota melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah



Kabupaten/Kota; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2022 Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan berakhirnya Tahun anggaran 2022, Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi vertikal BNN di daerah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP dan BNNK/Kota. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini telah merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

## **C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi;
- b. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. BNNP dipimpin oleh Kepala.

### **2. Tugas**

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi , dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;



- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum kerja sama dalam wilayah Provinsi P4GN.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administratif BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

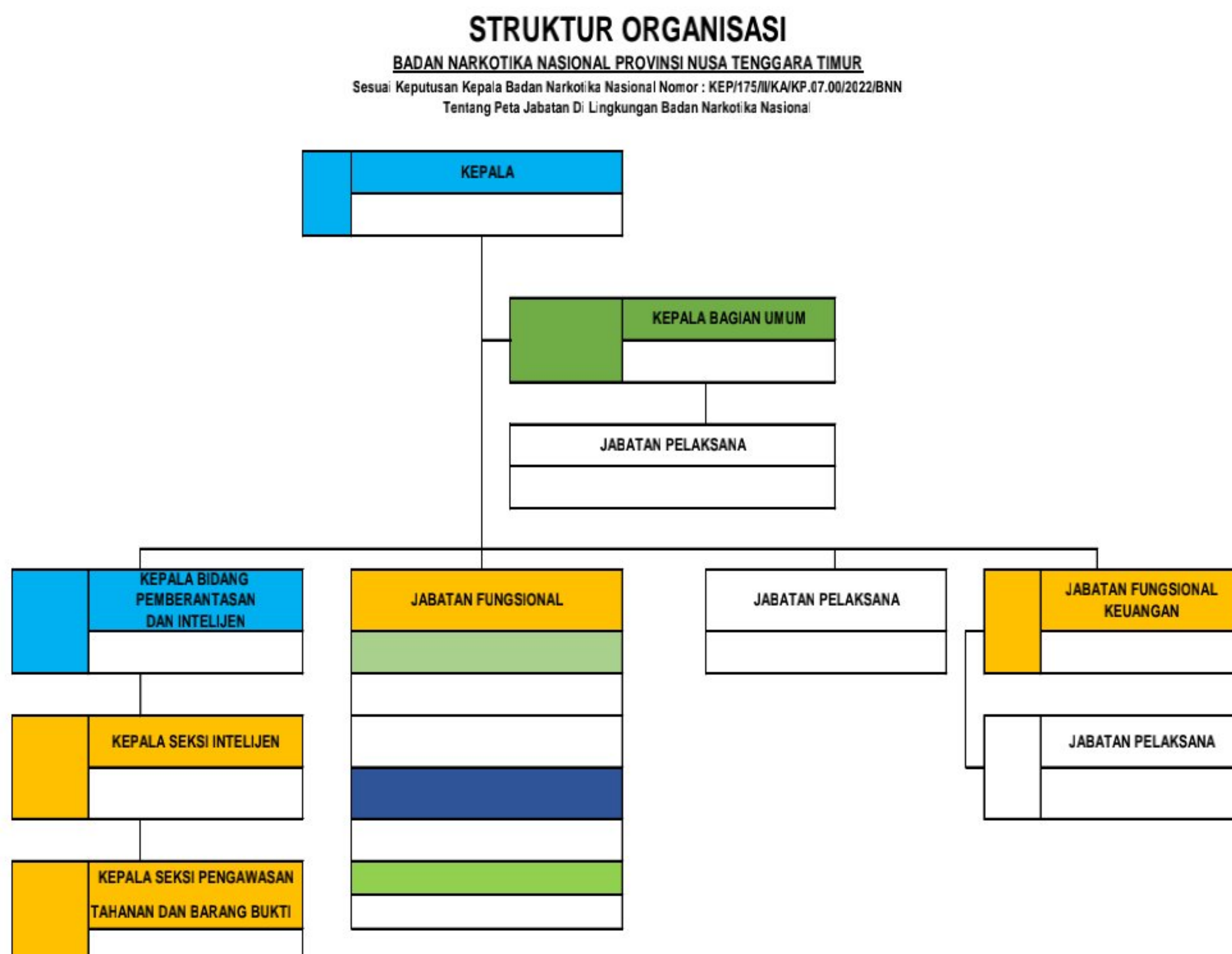
#### **D. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 175 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Bagian Umum;
- 3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4. Bidang Rehabilitasi; dan
- 5. Bidang Pemberantasan dan Intelijen.



Berikut Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur :



Dalam menjalankan organisasi, Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 132 orang yang terdiri dari PNS Organik, PNS dipekerjakan, Penugasan dari instansi Polri, dan PPNP, dengan rincian sebagai berikut :

| NO     | SATKER          | POLRI | PEMDA | BNN | JML | DSP | KET (+/-) | PPNP N | TOTAL PEGAWAI |
|--------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|--------|---------------|
| 1      | BNNP NTT        | 13    | -     | 16  | 29  | 238 | -209      | 23     | 52            |
| 2      | BNNK BELU       | 2     | -     | 15  | 17  | 71  | -54       | 16     | 33            |
| 3      | BNN KOTA KUPANG | 3     | 1     | 7   | 11  | 71  | -60       | 14     | 25            |
| 4      | BNNK ROTE NDAO  | -     | -     | 10  | 10  | 71  | -61       | 13     | 23            |
| JUMLAH |                 | 18    | 1     | 48  | 67  | 451 | -384      | 66     | 132           |



Dengan kondisi kelembagaan dan SDM sebagaimana tersebut di atas, maka Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terus membutuhkan upaya pengembangan SDM sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang dibutuhkannya. Untuk itu Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia secara cermat untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah yang tertuang dalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.

#### **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Wilayah Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **DAFTAR ISI**

##### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- Penjelasan umum organisasi (kedudukan organisasi, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi)
- Sistematika penyajian

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian kinerja organisasi tahun 2022 yang dilaporkan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan.

B. Realisasi Anggaran :

Realisasi/penyerapan anggaran disertai penjelasan singkat tentang penyerapannya.

##### **Bab IV PENUTUP**

##### **Lampiran**

- Ringkasan Laporan Realisasi Capaian Target dan Anggaran
- Perjanjian Kinerja Organisasi
- Lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran sasaran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020 – 2024.

Didalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang ditungkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BNN RI dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BNN Kab/Kota dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) Tahun Anggaran .

Perjanjian Kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen antara Kepala BNN RI dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BNN Kab/Kota dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan P4GN di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **B. Perjanjian Kinerja Satker Wilayah BNNP NTT Tahun 2022**

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi



sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel Perjanjian Kinerja**

**Unit Organisasi Eselon II : BNNP Nusa Tenggara Timur**

**Tahun Anggaran : 2022**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                          | TARGET             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                   | 4                  |
| 1  | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba | Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi | 3 Kabupaten / Kota |



| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                      | TARGET             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                               | 4                  |
| 2  | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah Kabupaten / Kota dengan ndeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi | 3 Kabupaten / Kota |
| 3  | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN                                 | Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi                        | 3 Kabupaten / Kota |
| 4  | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan                   | Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “ Siaga”                                    | 1 Kawasan          |
| 5  | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan                   | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi                                                                              | 2.99 Indeks        |
| 6  | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi                                                      | Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih                                                                                  | 25 Orang           |
| 7  | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi                                                      | Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis                                                               | 10 Orang           |
| 8  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkotika                       | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi                                   | 3 Lembaga          |
| 9  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkotika                       | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi                         | 5 Unit             |
| 10 | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi                              | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitas BNN di Provinsi                                                                      | 3.1 Indeks         |



| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                         | TARGET                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                  | 4                      |
| 11 | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21                                        | 5 Berkas Perkara       |
| 12 | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba                                              | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan                                                              | 100 Indeks             |
| 13 | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba                                              | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba                                                        | 100 Indeks             |
| 14 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien                                      | Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                            | 91 Indeks              |
| 15 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien                                      | Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target                      | 3 BNN Kabupaten / Kota |
| 16 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur                                   | Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur                                       | 95 Indeks              |
| 17 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur                                   | Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target | 3 BNN Kabupaten / Kota |

- |    |                                                                   |     |             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1. | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi                        | Rp. | 259.907.000 |
| 2. | Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi                                 | Rp. | 443.773.000 |
| 3. | Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat                      | Rp. | 847.604.000 |
| 4. | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif                  | Rp. | 101.500.000 |
| 5. | Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah       | Rp. | 252.416.000 |
| 6. | Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat       | Rp. | 388.319.000 |
| 7. | Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp. | 57.412.000  |
| 8. | Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi                 | Rp. | 75.000.000  |
| 9. | Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkoba        | Rp. | 304.503.000 |



|     |                                                                                                          |     |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 10. | Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti                                                             | Rp. | 90.705.000    |
| 11. | Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan                                                 | Rp. | 3.764.063.000 |
| 12. | Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia                                   | Rp. | 83.226.000    |
| 13. | Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN                                    | Rp. | 95.892.000    |
| 14. | Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana | Rp. | 5.472.518.000 |
| 15. | Kegiatan Peyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan                                                       | Rp. | 75.821.000    |



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2022 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan, 17 (tujuh belas) target kinerja dan 15 (lima belas) Kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) Rincian Output Kegiatan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu tahun 2022, evaluasi capaian kinerja yang perlu dilakukan dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan capaian kinerja awal RENPROJA Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 – 2024, sebagaimana diatur dalam perjanjian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Tahun 2022 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN yang menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 :

**1.**

**Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi**

Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

##### **a. Capaian indikator kinerja**

Target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kabupaten/Kota.



Berdasarkan kegiatan Pengembangan Keterampilan Hidup (*softskill*) di SMP dan SMU sederajat dan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika tingkat BNNK, realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi NTT sebagai berikut :

| No | Indikator                                                                                            | Target     | Realisasi  | %     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1  | Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi | 3 kab/kota | 2 kab/kota | 66.67 |

Adapun nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba pada tingkat BNNP dan BNNK Jajaran sebagai berikut :

| No | Satker          | Target    | Realisasi    | %             | Kategori      |
|----|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | BNNP NTT        | 52        | 53.09        | 102.09        | Tinggi        |
| 2  | BNNK Belu       | 50        | 57.25        | 114.50        | sangat tinggi |
| 3  | BNN Kota Kupang | 50        | 50.49        | 100.98        | Tinggi        |
| 4  | BNNK Rote Ndao  | 50        | 49.47        | 98.94         | Rendah        |
|    | <b>Prov NTT</b> | <b>52</b> | <b>52.57</b> | <b>101.09</b> | <b>Tinggi</b> |

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil perhitungan indeks ketahanan diri anti narkoba terhadap remaja usia 12 s.d. 21 tahun (pelajar dan mahasiswa) yang telah dilakukan penyuluhan/sosialisasi sebanyak 19.015 orang oleh penyuluh BNNP dan BNNK berkategori tinggi dengan nilai 52.57 melampaui target sebesar 52 sehingga capaian sebesar 101,09%.

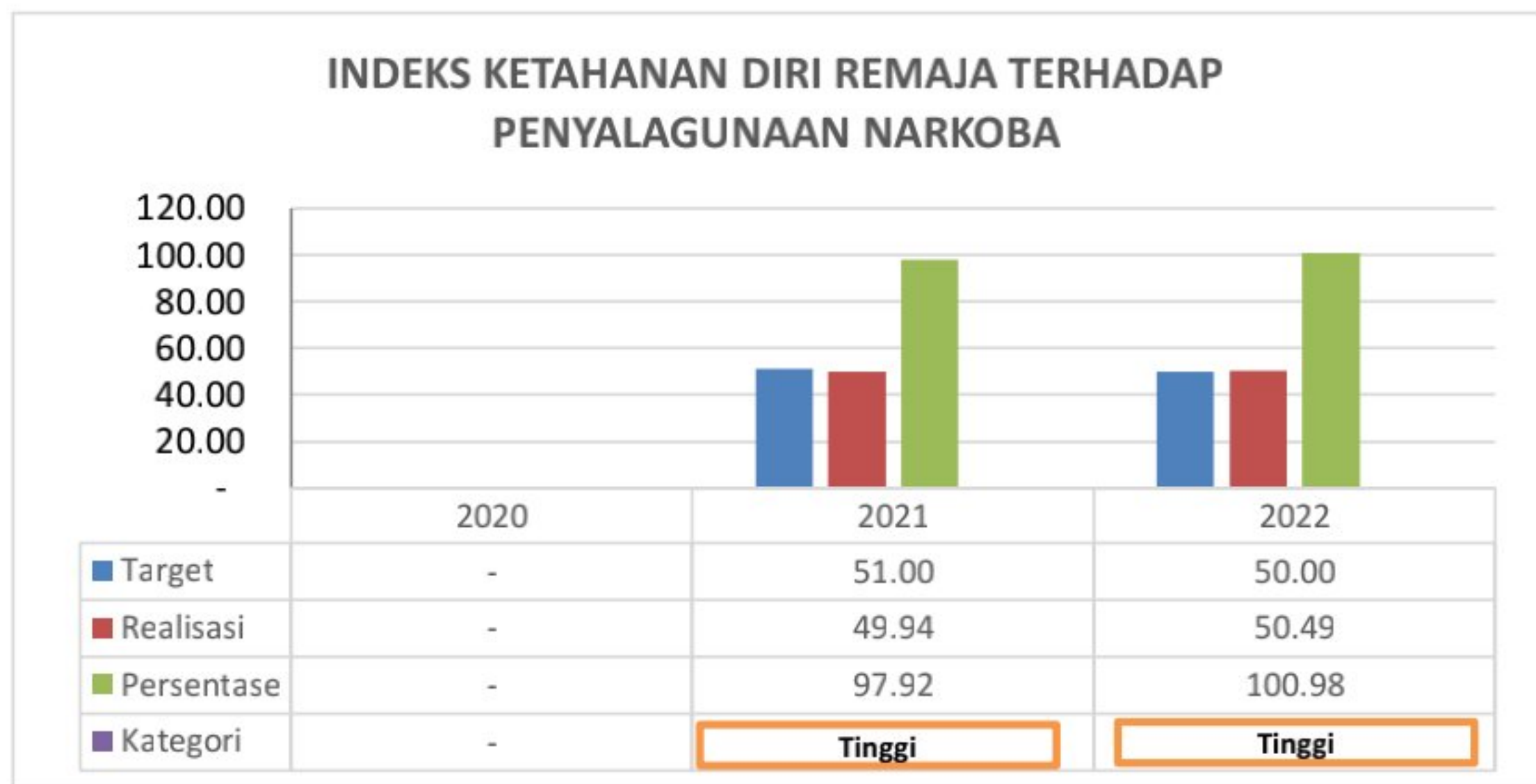
Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



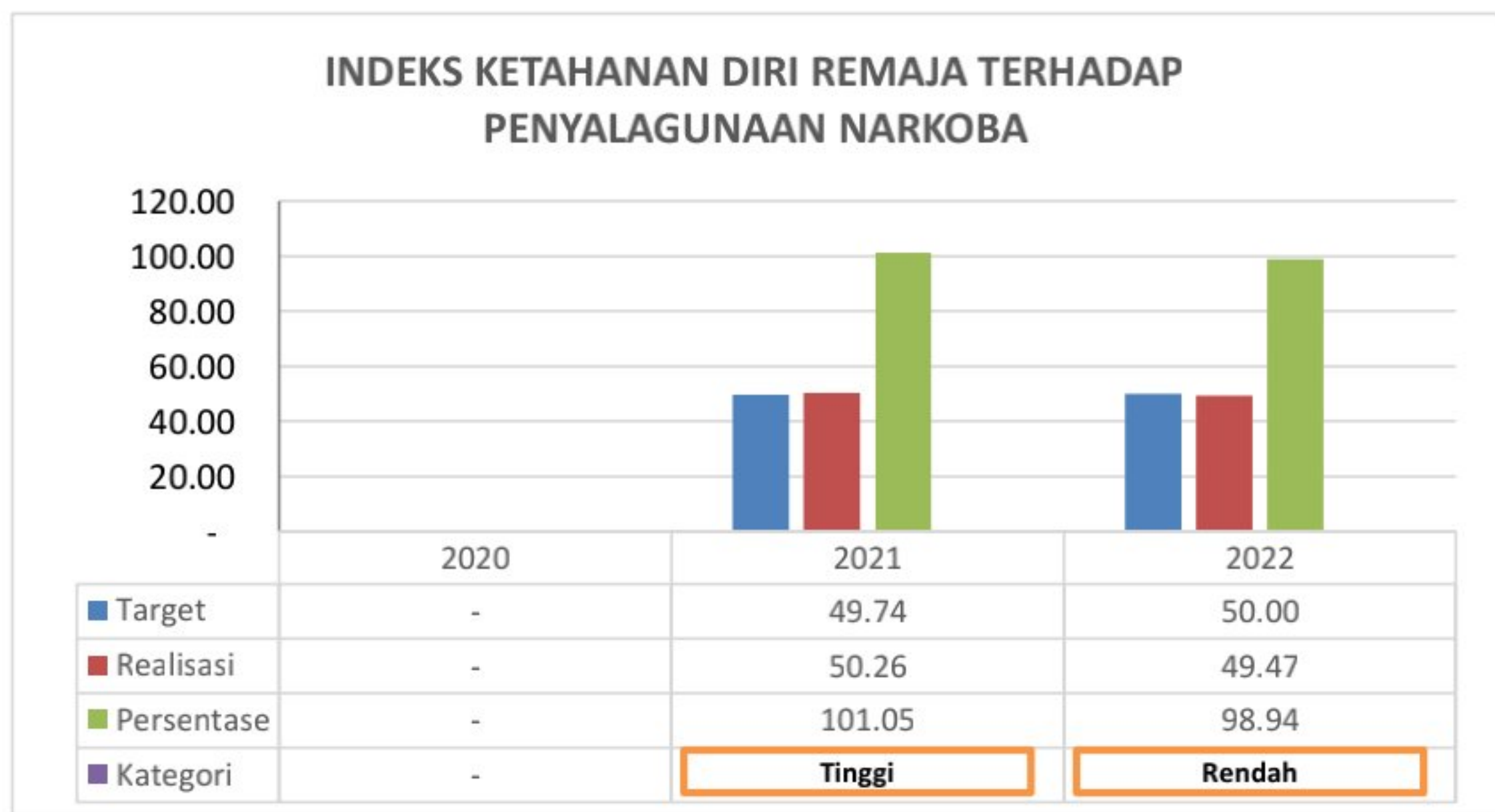
### 1. BNN Kabupaten Belu



### 2. BNN Kota Kupang



### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao





## b. Metode Pengukuran

Para Siswa yang telah mendapatkan pengembangan *softskill* anti narkoba mengisi kuesioner secara *online* pada aplikasi Dektari Aja. Jawaban responden akan menggambarkan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang meliputi dimensi:

### a. Self regulation

Kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.

### b. Assertiveness

Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.

### c. Reaching out

Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Analisa pengukuran indeks dari jawaban para responden ini dihitung secara *online* pada aplikasi Dektari Aja, dan didapatkan hasil capaian tiap Kabupaten sesuai kategorisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja sebagaimana tabel diatas. Adapun dari 3 Kabupaten/Kota jajaran BNNP NTT, 2 Kabupaten/Kota memiliki capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi”.

Adapun perhitungan persentase jumlah kabupaten/kota dengan capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\% \text{ Capaian} : \frac{3 \text{ Kab/Kota}}{2 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 66.67 \%$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor kegagalan dari realisasi capaian persentase indikator ketahanan diri remaja anti narkoba Tahun 2022 tidak mencapai target



yang ditetapkan karena terdapat 1 BNNK dengan nilai Indeks Ketahanan Diri berkategori “Rendah” yaitu BNNK Rote Ndao dapat dikarenakan :

- 1) Pelaksanaan program Teman Sebaya di Kabupaten Rote Ndao belum berjalan maksimal, karena kurangnya SDM sebagai fasilitator.
- 2) Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuesioner dan kesalahan dalam penginputan.

Namun secara keseluruhan untuk tingkat provinsi NTT, nilai dektari berkategori Tinggi dan mencapai target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Pelaksanaan sosialisasi kepada remaja sesuai dengan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba.
- 2) Pemahaman sasaran terhadap konsep ketahanan diri dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) Metode sosialisasi cukup efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan narkoba.
- 4) Keterpedulian lingkungan sekolah dalam upaya P4GN yang melibatkan pada siswa/i.

#### **d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyebarluaskan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan media untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
- 3) Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan KIE tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat seperti lomba-lomba kreatif yang melibatkan masyarakat.



- 4) Membuat terobosan yang inovatif dan masif dalam KIE P4GN seperti melalui Lembaga Pendidikan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan anti narkoba kedalam kurikulum mata pelajaran.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan di lingkup BNNP dan BNNK/Kota.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.

|           |                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b> | <b>Indikator Kinerja: Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah pengukuran keterampilan hidup keluarga anti narkoba dalam membentuk daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**a. Capaian indikator kinerja**

Dalam perjanjian kinerja BNNP NTT dan BNNK Jajaran pada Tahun 2022 target Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kegiatan advokasi pembangunan berawasan anti narkoba yang telah dilaksanakan BNNP NTT dan BNNK Jajaran Tahun 2021 melalui Asistensi/Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba, capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Tahun 2022 sebagai berikut :

| No | Indikator                                                                                                                 | Target        | Realisasi     | %      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1  | Jumlah Kab/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi | 3<br>kab/kota | 1<br>kab/kota | 33.3 % |

Dengan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada tingkat BNNP dan BNNK Jajaran sebagai berikut :



| No | BNNK            | Target       | Realisasi    | %             | Kategori      |
|----|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | BNNP NTT        | 78.68        | 85.89        | 109.16        | Tinggi        |
| 2  | Belu            | 75           | 75.80        | 101.06        | Rendah        |
| 3  | Kota Kupang     | 75           | 74.91        | 99.88         | Rendah        |
| 4  | Rote Ndao       | 75           | 78.48        | 104.64        | Tinggi        |
|    | <b>Prov NTT</b> | <b>78.68</b> | <b>78.77</b> | <b>100.11</b> | <b>Tinggi</b> |

Adapun indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mencapai target Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 78.77 kategori Tinggi, namun jika dilihat dari target Kabupaten/Kota dengan nilai Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berkategori Tinggi, belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan hanya 1 dari 3 Kabupaten/Kota yang mencapai indeks sebesar 78.68 dengan kategori “Tinggi” yaitu Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan 2 Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Belu dan Kota Kupang capaian indeks ketahanan keluarga dibawah 78.68 dengan kategori “Rendah”.



Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

1. BNN Kabupaten Belu



2. BNN Kota Kupang





### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



#### b. Metode Pengukuran

Pengukuran indeks ketahanan keluarga anti narkoba dilakukan melalui pengisian kuesioner secara *online* menggunakan aplikasi dektara. Fasilitator memandu peserta dalam mengisi aplikasi untuk mengukur sejauh mana keluarga memiliki keterampilan hidup anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba, antara lain :

- 1) *Belief system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) *Organizational Process* (*proses organisasi*). Struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) *Communication/problem-solving processes* (*proses komunikasi*). Suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Dari pengukuran secara *online*, diperoleh hasil bahwa 1 dari 3 kabupaten/kota memiliki indeks ketahanan keluarga dengan kategori “tinggi” yaitu Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan 2 Kabupaten/Kota memiliki hasil indeks ketahanan keluarga berkategori “rendah” yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Belu. Adapun perhitungan persentase



Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga berkategori “Tinggi” sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

|             |                                    |                           |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
|             | 3 Kab/Kota                         |                           |
| Realisasi : | $\frac{\quad}{1 \text{ Kab/Kota}}$ | $\times 100 \% = 33.3 \%$ |

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan keluarga anti narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Nusa Tenggara Timur belum mencapai target sebanyak 3 Kabupaten/Kota, dikarenakan terdapat 2 Kabupaten/Kota dengan hasil perhitungan indeks pada kategori “Rendah” yaitu Kabupaten Belu dan Kota Kupang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Pelaksanaan fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba di Kabupaten Belu dan Kota Kupang belum berjalan maksimal, karena kurangnya SDM sebagai fasilitator.
- 2) Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektara tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuesioner dan kesalahan dalam penginputan.
- 3) Kurangnya partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga.
- 4) Konsistensi praktek peserta pasca fasilitasi tidak berjalan maksimal di Kabupaten Belu dan Kota Kupang.
- 5) Ketahanan keluarga belum menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks ketahanan keluarga anti narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka rencana aksi dan strategi kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan petugas/fasilitator melalui pelatihan/pembekalan/workshop.



- 2) Memilih peserta ketahanan keluarga lebih selektif lagi berdasarkan aspek responsif dan partisipasi aktif di lingkungan masyarakat, serta merupakan warga masyarakat yang menjadi tokoh/panutan di lingkungannya.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga.
- 4) Peningkatan pengawasan atau evaluasi dalam pelaksanaan ketahanan keluarga.

### 3.

#### Indikator Kinerja: Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi

Indeks Kemandirian Partisipasi adalah Pengukuran kemandirian penggiat anti narkoba yang berperan aktif dalam program pemberdayaan anti narkoba di lingkungannya, meliputi lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Diharapkan peran penggiat anti narkoba secara mandiri dalam P4GN ini mampu berdaya guna dan berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba.

##### a. Capaian indikator kinerja

Target perjanjian kinerja untuk indikator Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 3 Kab/Kota, dengan rincian capaian sebagai berikut :

| NO | Satker   | Target | Realisasi | % Realisasi |
|----|----------|--------|-----------|-------------|
| 1  | BNNP NTT | 3      | 3         | 100 %       |

Dengan rincian nilai Indeks Kemandirian Partisipasi pada BNNP dan tingkat BNNK Jajaran sebagai berikut :

| No | BNNK        | Target | Realisasi | %      | Kategori |
|----|-------------|--------|-----------|--------|----------|
| 1  | BNNP NTT    | 3.20   | 3.25      | 101.56 | Mandiri  |
| 2  | Belu        | 3.20   | 3.02      | 94.37  | Mandiri  |
| 3  | Kota Kupang | 3.20   | 2.89      | 90.31  | Mandiri  |

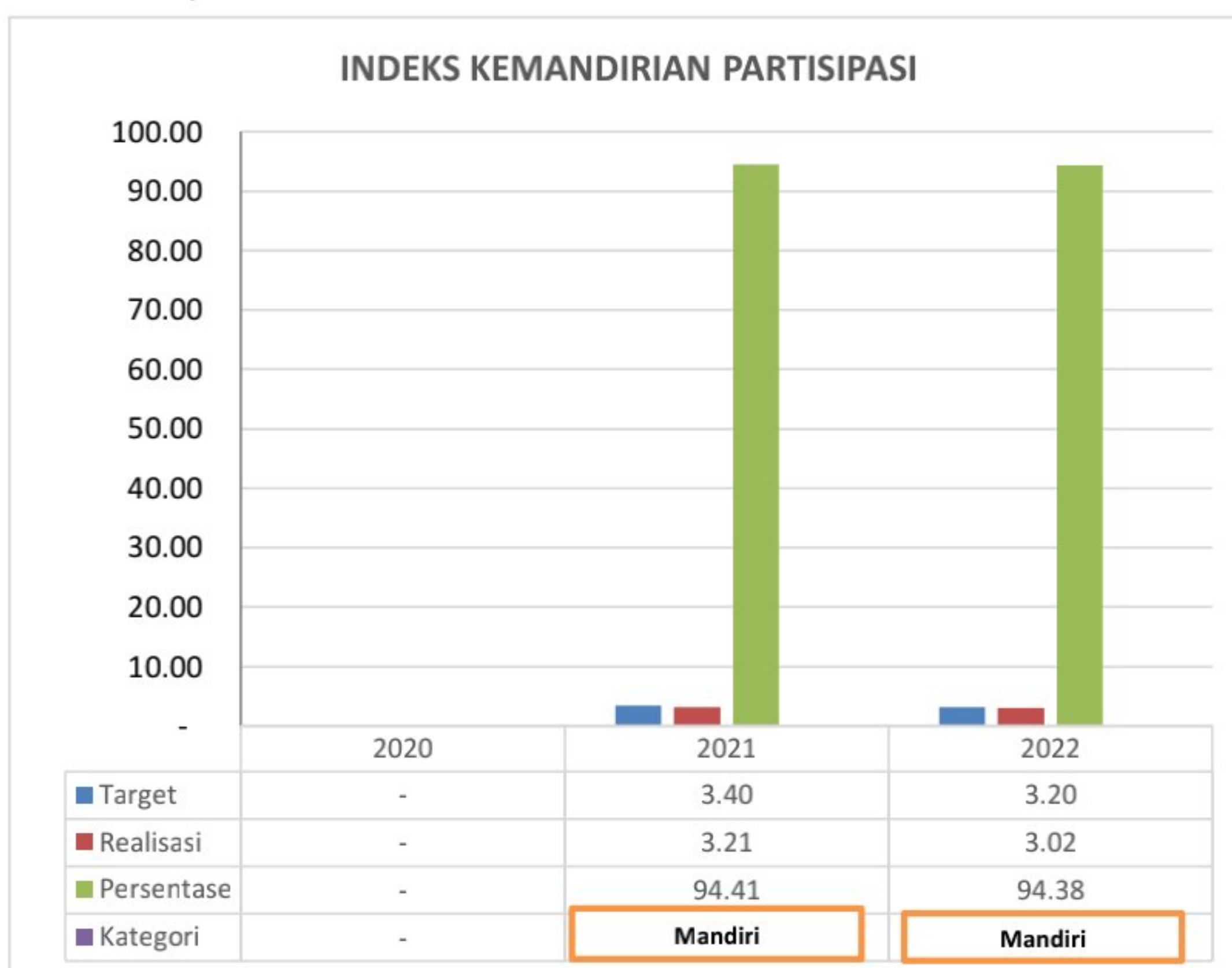


|   |                |             |             |              |                |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 4 | Rote Ndao      | 3.20        | 3.21        | 100.31       | Mandiri        |
|   | <b>IKP NTT</b> | <b>3.20</b> | <b>3.09</b> | <b>96.56</b> | <b>Mandiri</b> |

Seluruh BNNK jajaran di wilayah Provinsi NTT mencapai target Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”, termasuk capaian pemberdayaan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh BNNP.

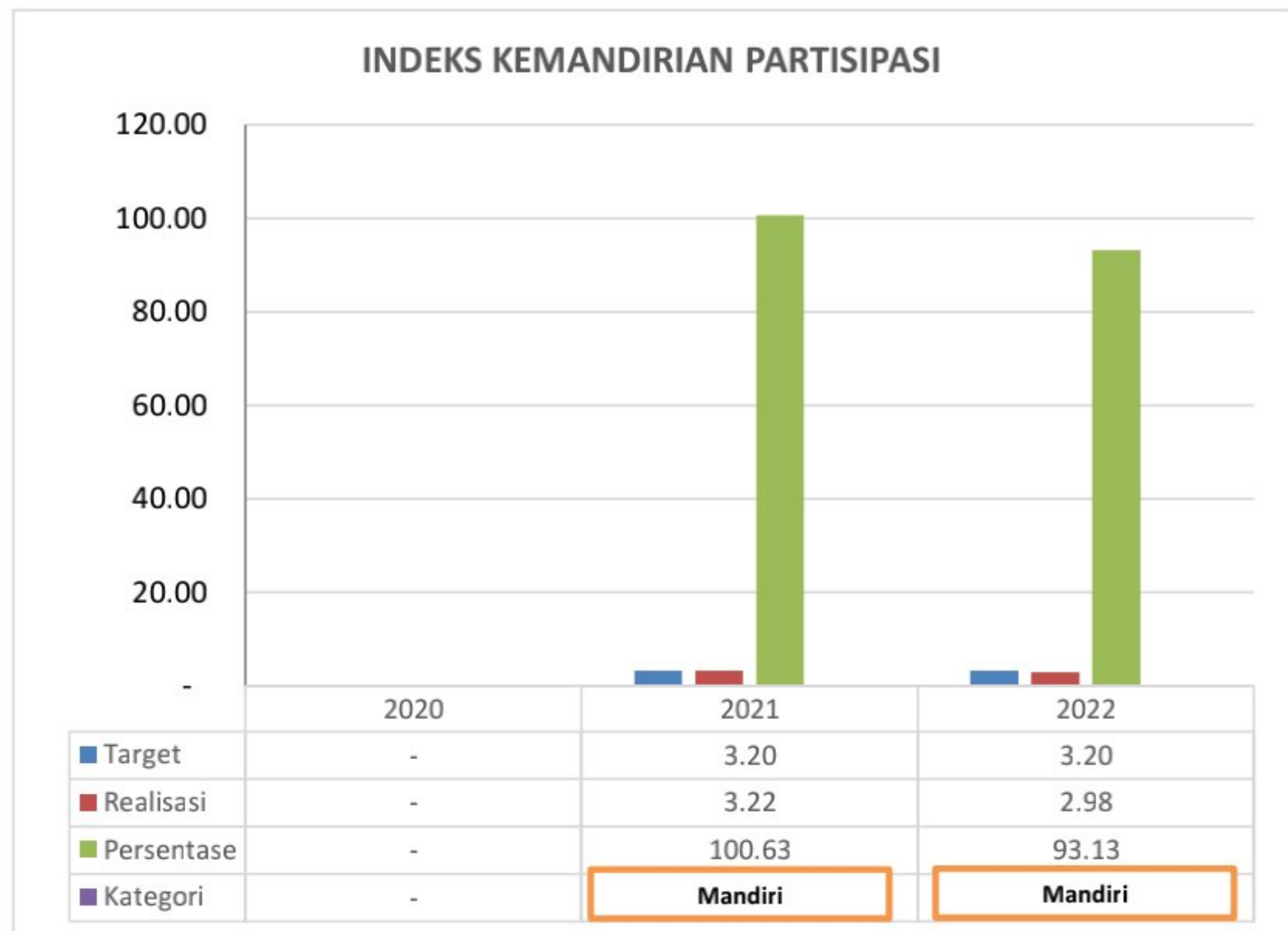
Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

#### 1. BNN Kabupaten Belu

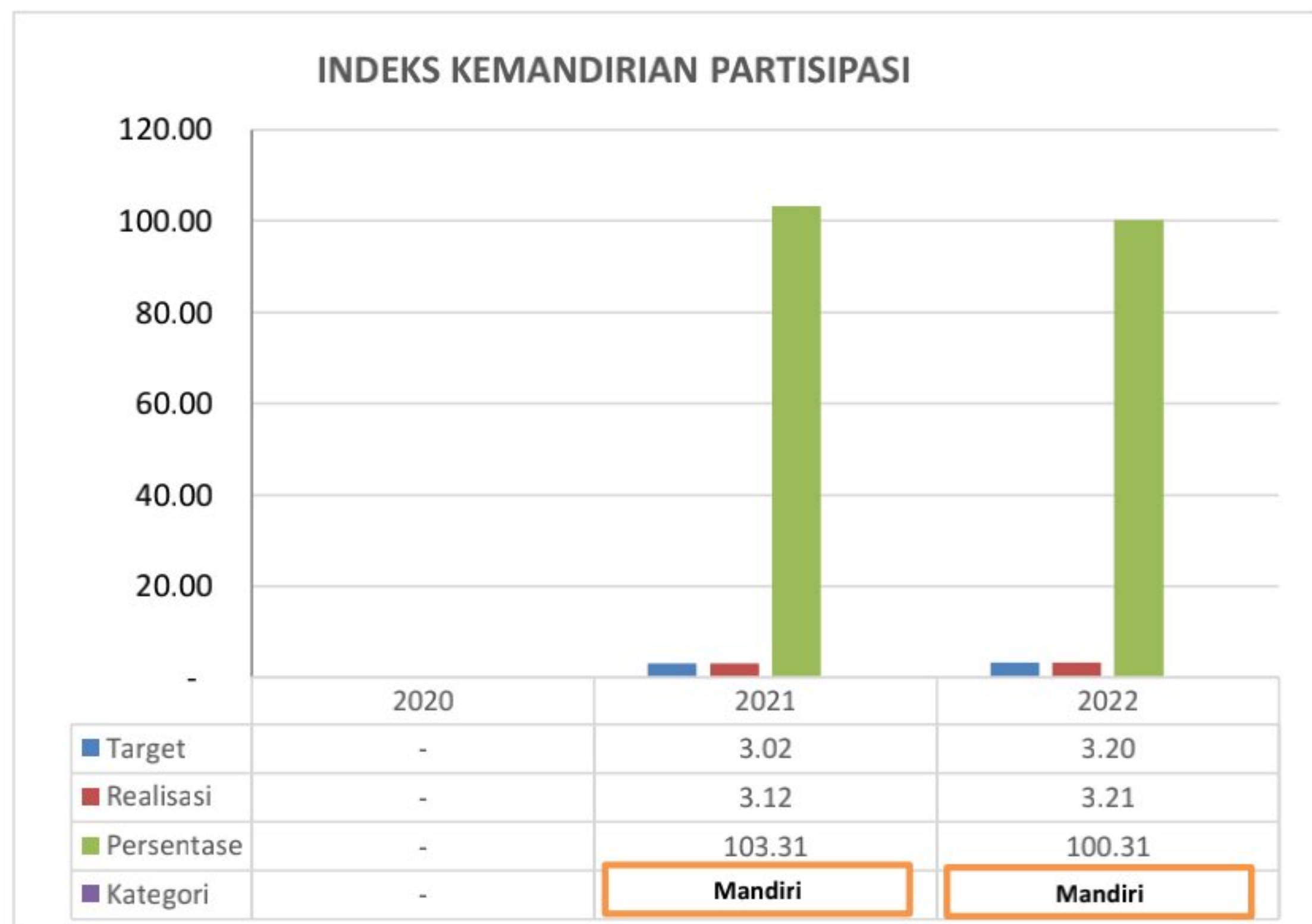




## 2. BNN Kota Kupang



## 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



### b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks kemandirian partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN diukur menggunakan kuesioner



IKP yang meliputi 5 aspek yaitu: aspek manusia, metode, anggaran, sistem, sarana prasarana, dan kegiatan. Kuesioner dibagikan dan diisi oleh penggiat anti narkoba dari instansi/lembaga yang telah mendapatkan pengembangan kapasitas P4GN baik melalui workshop maupun bimtek P4GN. Untuk memperoleh nilai IKP dari masing – masing lembaga, penghitungan dilakukan dengan rumus :

|     |   |                                                 |
|-----|---|-------------------------------------------------|
| IKP | = | $\frac{\text{Hasil Perhitungan Kuesioner}}{25}$ |
|-----|---|-------------------------------------------------|

Kemudian dari hasil indeks yang diperoleh dapat ditentukan kategori kemandirian dengan interval sebagai berikut :

| NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | KATEGORI IKP | KRITERIA       |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 1,00 – 1,75    | 25,00 – 43,75           | D            | Tidak Mandiri  |
| 1,76 – 2,50    | 43,76 – 62,50           | C            | Kurang Mandiri |
| 2,51 – 3,25    | 62,51 – 81,25           | B            | Mandiri        |
| 3,26 – 4,00    | 81,26 – 100,00          | A            | Sangat Mandiri |

Adapun rincian capaian indeks kemandirian partisipasi penggiat anti narkoba di wilayah BNNP NTT dan jajaran per lingkungan sebagai berikut :

| NO | Satker         | Instansi Pemerintah | Dunia Usaha/swasta | Lingk. Masyarakat | Lingk. Pendidikan | =Σ% capaian indeks | Kategori/Kriteria |
|----|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | BNNP NTT       | -                   | -                  | 3.27              | 3.24              | 3.25               | Mandiri           |
| 2  | BNNK Kupang    | 3.21                | 2.57               | 2.57              | 3.21              | 2.89               | Mandiri           |
| 3  | BNNK Rote Ndao | 3.28                | 3.36               | 3.14              | 3.04              | 3.21               | Mandiri           |
| 4  | BNNK Belu      | 3.30                | 2.97               | 2.93              | 2.90              | 3.02               | Mandiri           |

**Tabel 2.Indeks Kemandirian Partisipasi Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di Lingkungan BNNP NTT Tahun 2022**

| NO | Satker   | KRITERIA                             | PERHITUNGAN |        |                |         |
|----|----------|--------------------------------------|-------------|--------|----------------|---------|
|    |          |                                      | PMRNTH      | SWASTA | MASY.          | PNDDKN  |
| 1  | BNNP NTT | Nilai IKP Setelah Dikonversi         | -           | -      | 3.27           | 3.24    |
|    |          | Nilai Interval Konversi Dikalikan 25 | -           | -      | 81.75          | 81.00   |
|    |          | Kategori IKP                         | -           | -      | A              | B       |
|    |          | Kriteria Kemandirian Partisipasi     | -           | -      | Sangat Mandiri | Mandiri |



|   |                |                                      |                |                |         |         |
|---|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 2 | BNNK Kupang    | Nilai IKP Setelah Dikonversi         | 3,21           | 2,57           | 2,57    | 3,21    |
|   |                | Nilai Interval Konversi Dikalikan 25 | 80,25          | 64,25          | 64,25   | 80,25   |
|   |                | Kategori IKP                         | B              | B              | B       | B       |
|   |                | Kriteria Kemandirian Partisipasi     | Mandiri        | Mandiri        | Mandiri | Mandiri |
| 3 | BNNK Rote Ndao | Nilai IKP Setelah Dikonversi         | 3,28           | 3,36           | 3,14    | 3,04    |
|   |                | Nilai Interval Konversi Dikalikan 25 | 82,00          | 84,00          | 78,50   | 76,00   |
|   |                | Kategori IKP                         | A              | A              | B       | B       |
|   |                | Kriteria Kemandirian Partisipasi     | Sangat Mandiri | Sangat Mandiri | Mandiri | Mandiri |
| 4 | BNNK Belu      | Nilai IKP Setelah Dikonversi         | 3,30           | 2,97           | 2,93    | 2,90    |
|   |                | Nilai Interval Konversi Dikalikan 25 | 83,50          | 74,25          | 73,25   | 72,50   |
|   |                | Kategori IKP                         | A              | B              | B       | B       |
|   |                | Kriteria Kemandirian Partisipasi     | Sangat Mandiri | Mandiri        | Mandiri | Mandiri |

**Tabel 3. Capaian Advokasi Lembaga Berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba**

| NO | Satker         | Instansi Pemerintah                   | Instansi swasta                      | Kelompok Masyarakat                 | Lingkungan pendidikan      |
|----|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1  | BNNP NTT       | -                                     | -                                    | Kwarda NTT (3.36)                   | SMK PP N Kupang (3,38)     |
| 2  | BNNK Belu      | Badan Kesbapol Kab Belu (3,60)        | SMA Swasta Bina Karya Atambua (3,40) | Desa silawan (3,52)                 | SMA Cu Imaculata (3,32)    |
| 3  | BNNK Kupang    | Kesbangpol kota kupang (3.36)         | Radio Swara Kupang (3.20)            | Kelurahan liliba kota kupang (3.12) | SMK Negeri 3 Kupang (3,36) |
| 4  | BNNK Rote Ndao | Kodim 1627 Rote Ndao (Babinsa) (3.28) | Hosana Cafe (3.36)                   | Desa Baadale (3.14)                 | SMA N 1 Lobalain (3.04)    |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Realisasi:</b> <math>\frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 100\%</math></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari data diatas jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi “Mandiri” pada tingkat BNNK adalah sebanyak 3 BNN Kab/Kota, dengan capaian target sebesar 100%.

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah instansi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba sebesar 100% adalah :



- a. Intensifikasi advokasi kepada stakeholder terkait yang menjadi penggiat anti narkoba dalam upaya P4GN di lingkungannya masing-masing.
- b. Komitmen dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan P4GN di lingkungannya masing-masing untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap ancaman Narkoba.
- c. Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan anti narkoba yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
- d. Program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan standar aktifitas dan *timeline* yang telah ditetapkan di awal tahun.
- e. Hubungan dan kerjasama yang baik BNNP NTT dan BNNK/Kota dengan stakeholder dan pemegang kebijakan.
- f. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di setiap komponen masyarakat.
- g. Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya :
  - a) Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan P4GN.
  - b) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
  - c) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 47 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Kabupaten Rote Ndao.
  - d) Surat Edaran Walikota Kupang Nomor: BAG.KESRA.001/354/I/2019, tanggal 11 Januari 2019 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
  - e) Surat Edaran Bupati Belu Nomor: BKBP-354/276/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.



Selain itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba juga menghadapi beberapa kendala diantaranya :

- a) Pemahaman dan komitmen para stakeholder tentang P4GN belum memadai, dan masih beranggapan bahwa tugas P4GN hanya tugas BNN semata;
- b) Alokasi anggaran P4GN yang tersedia belum mengakomodir daerah kepulauan, sehingga program pemberdayaan anti narkoba hanya bisa menjangkau Kabupaten/Kota yang ada BNNKnya saja;
- c) Kesulitan dalam pelaksanaan monev program karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk biaya akomodasi ke Kabupaten sasaran. Monev hanya dilakukan via telepon, email, maupun media elektronik lainnya, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal (tidak semua stakeholder memberikan feedback, dan kendala sarana prasarana media (tidak mempunyai email/whatsapp);
- d) Tidak semua stakeholder mampu menganggarkan biaya untuk P4GN, terutama pelaksanaan tes urine (rata-rata daerah di NTT memiliki PAD rendah, dengan program anggaran saat ini lebih dititikberatkan pada penanganan covid-19 dan pembangunan infrastruktur, termasuk sarana air bersih yang masih sangat kurang), sehingga cukup sulit untuk mengalokasikan biaya pengadaan alat tes urine narkoba di setiap pemerintah kabupaten.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah instansi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka advokasi kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
- 2) Mendorong pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, dunia usaha dan masyarakat agar melaksanakan upaya P4GN di lingkungannya



melalui penyebaran informasi P4GN, deteksi dini dan pembentukan satgas P4GN.

- 3) Terus berupaya menginisiasi dan memotivasi para penggiat agar dapat melakukan kegiatan P4GN yang tidak membutuhkan biaya (seperti kampanye dan sosialisasi anti narkoba pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada/insert).
- 4) Mendorong instansi/lembaga membentuk penggiat anti narkoba di lingkungannya masing-masing.
- 5) Meningkatkan peran instansil/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi aktif mendukung program P4GN.

## 4.

### **Indikator Kinerja: Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"**

Program pemberdayaan alternatif hanya dilaksanakan di tingkat BNNP NTT, dikarenakan BNNK belum mendapatkan anggaran untuk program pemberdayaan kawasan/wilayah rawan tersebut.

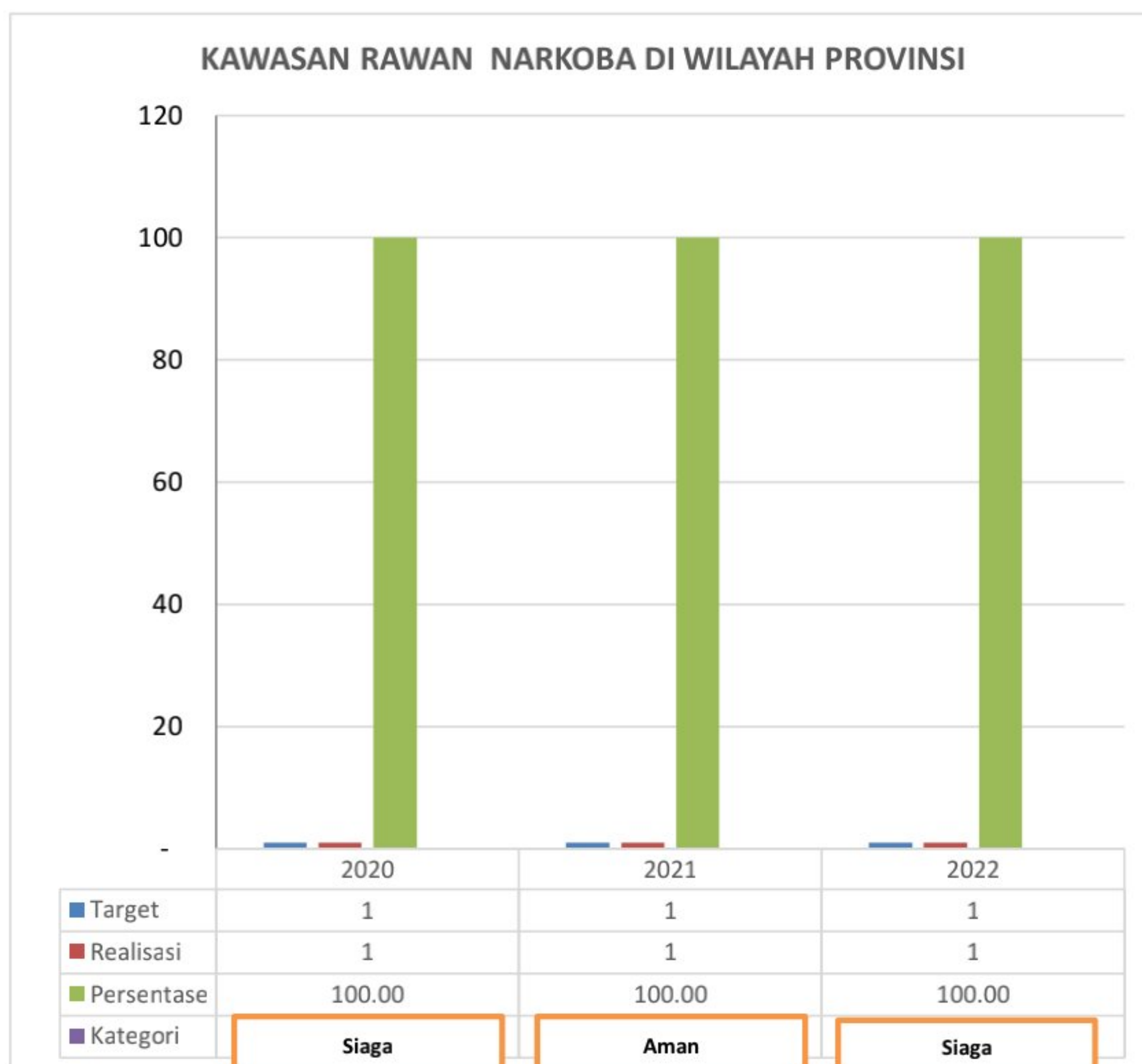
#### **a. Capaian indikator kinerja**

Target Jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif sesuai Perjanjian kinerja BNNP NTT tahun 2022 sebanyak 1 kawasan. Berdasarkan kegiatan pemberdayaan alternatif yang telah dilaksanakan BNNP NTT pada kawasan/wilayah rawan yang diintervensi sebanyak 1 kawasan Tahun 2022 dengan capaian sebagai berikut :

| No | Indikator                                                                                    | Target    | Realisasi | %    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1  | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi " Siaga" | 1 kawasan | 1 kawasan | 100% |



Berikut disajikan data pembandingan realisasi target kinerja Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga" tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



program pemberdayaan alternatif pada tahun 2022 adalah Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang melalui kegiatan rapat kerja dengan stakeholder, pelatihan *life skill* di bidang pertanian hidroponik, pemberian bantuan peralatan dan bahan kerja, serta monitoring evaluasi.

Kegiatan bimbingan teknis *life skill* bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba dengan jenis pelatihan pertanian hidroponik kepada 15 orang, tempat pelaksanaan pelatihan di Kantor Kelurahan Oebobo dan Evolusi Hidroponik Kupang (Evohidro) yang diikuti masyarakat dari Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.



| NO | Satker   | Kawasan   | Pelatihan life skill | Keterangan                                                                               |
|----|----------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BNNP NTT | 1 kawasan | 15 orang             | lifeskill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di wilayah perkotaan (Mula dan lanjutan) |

#### b. Metode Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan alternatif adalah melalui Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dengan melihat kondisi ketidakrawanan kawasan tersebut dibandingkan dengan kondisi kerawanan narkoba hasil pemetaan kerawanan narkoba sebelumnya.

Adapun perhitungan capaian jumlah kawasan yang mengalami keterpulihan kerawanan sebagai berikut :

*Perhitungan capaian:*

|           |   |                                               |               |
|-----------|---|-----------------------------------------------|---------------|
| % Capaian | : | $\frac{1 \text{ kawasan}}{1 \text{ kawasan}}$ | x 100% = 100% |
|-----------|---|-----------------------------------------------|---------------|

Dari data diatas jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif adalah sebanyak 1 kawasan, dengan capaian target sebesar 100%.

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif sebesar 100% adalah:

- 1) Kawasan rawan yang diintervensi program pemberdayaan cukup responsif.
- 2) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebaran informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik.
- 3) Pendekatan program pemberdayaan alternatif yang dilakukan cukup efektif, efisien dan tepat sasaran karena melalui beberapa tahapan kegiatan dengan melibatkan stakeholder terkait antara lain : pemetaan



potensi kawasan rawan, rapat sinergitas dengan stakeholder dan bimbingan teknis dengan stakeholder.

- 4) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebarluasan informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik agar masyarakat memiliki aktifitas positif yang dapat menjadi aksi nyata di lingkungannya.
- 5) Tidak ada kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama intervensi program dan akan terus dimonitoring pada tahun berjalan.
- 6) Selain pemberdayaan alternatif, kawasan ini juga mendapatkan intervensi Rehabilitasi IBM dan Intervensi Desa Bersinar.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif juga mengalami beberapa kendala antara lain :

- 1) Anggaran yang tersedia hanya mampu memfasilitasi 15 Orang warga binaan, sementara masih banyak warga lainnya yang ingin mengikuti program kegiatan.
- 2) Waktu pelatihan yang direncanakan sangat singkat sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga kemampuan warga binaan dalam menciptakan produk masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
- 3) Tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam P4GN termasuk pengembangan kewirausahaan.
- 4) Minimnya kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Minimnya bantuan modal usaha, terutama dari dunia usaha/swasta, termasuk BUMN/BUMD untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Kurang adanya sinergi/sinkronisasi program serupa dari pemerintah daerah, sehingga dukungan anggaran dan pelaksanaan program hanya dari BNNP saja dan mitra pertanian hidroponik.



#### d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba.
- 2) Kegiatan P4GN disisipkan pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tingkat desa/kelurahan.
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk mendukung P4GN dengan regulasi.
- 4) Bermitra dengan yayasan/LSM/Lembaga swasta dalam pemulihan kawasan rawan melalui pengembangan kewirausahaan.

## 5.

### Indikator Kinerja: Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi

Keterpulihan kawasan rawan diukur menggunakan Indeks Keterpulihan Kawasan (IKKR). Indeks keterpulihan adalah angka indeks yang dihasilkan melalui proses perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala.

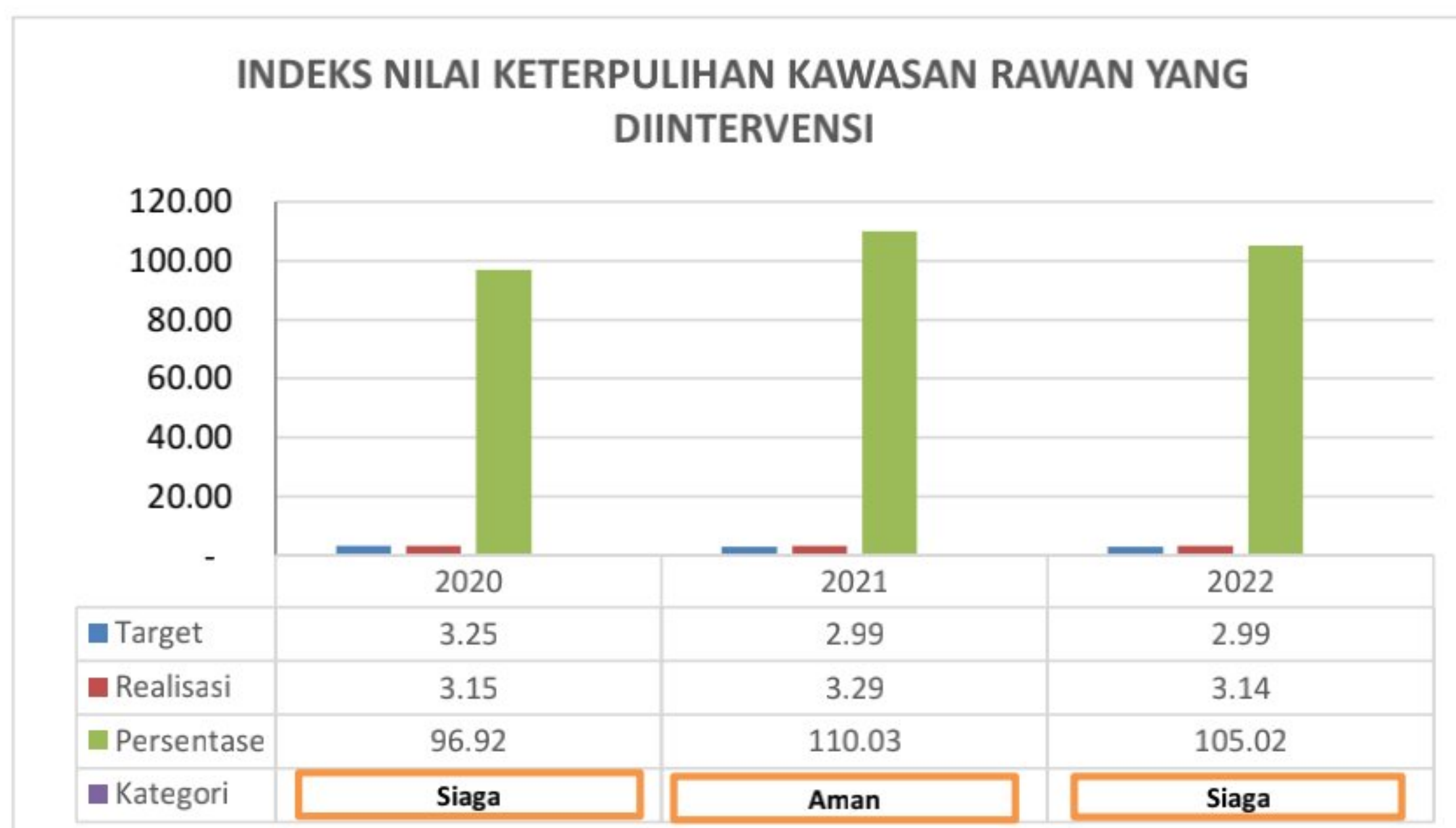
#### a. Capaian indikator kinerja

Target Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi sesuai Perjanjian kinerja dengan 2.99 indeks. Berdasarkan kegiatan pemberdayaan alternatif yang telah dilaksanakan BNNP NTT pada kawasan/wilayah rawan yang diintervensi dengan capaian indeks sebagai berikut :

| No | Indikator                                          | Target      | Realisasi | %        |
|----|----------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 1  | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi | 2.99 indeks | 3.14      | 105.01 % |



Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 :



#### b. Metode Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan alternatif adalah melalui Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dengan melihat kondisi ketidakrawanan kawasan tersebut dibandingkan dengan kondisi kerawanan narkoba hasil pemetaan kerawanan narkoba sebelumnya.

Metode pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) dalam pelaksanaan pemberdayaan alternatif diukur melalui 3 variabel dan 20 indikator yaitu: 8 indikator pokok kerawanan narkoba, 5 indikator pendukung, dan 7 indikator tingkat keberhasilan program dengan pembobotan sebagai berikut :

| No | Variabel                          | Indikator            | Bobot |
|----|-----------------------------------|----------------------|-------|
| 1. | Indikator pokok kerawanan narkoba | Bandar narkoba       | 8     |
| 2. |                                   | Produksi narkoba     | 7     |
| 3. |                                   | Entry point narkoba  | 6     |
| 4. |                                   | Kurir narkoba        | 5     |
| 5. |                                   | Pecandu narkoba      | 4     |
| 6. |                                   | Kasus narkoba        | 3     |
| 7. |                                   | Barang bukti narkoba | 2     |
| 8. |                                   | Kejahatan umum       | 1     |



|     |                              |                                 |           |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 9.  | Indikator pendukung          | Tempat hiburan                  | 5         |
| 10. |                              | Angkakemiskinan                 | 4         |
| 11. |                              | Kos-kosan                       | 3         |
| 12. |                              | Sarana public                   | 2         |
| 13. |                              | Interaksi social                | 1         |
| 14. | Tingkat keberhasilan program | Hasil yang dirasakan masyarakat | 7         |
| 15. |                              | Keberlanjutan program           | 6         |
| 16. |                              | Pelaksana program               | 5         |
| 17. |                              | Pelaksanaan program             | 4         |
| 18. |                              | Sinergi instansi pemerintah     | 3         |
| 19. |                              | Kemitraan dunia usaha           | 2         |
| 6   |                              | Dampak keberdayaan masy         | 1         |
|     |                              | Jumlah total (n = 1)            | <b>79</b> |

Jawaban responden dari tiap-tiap indikator diatas dikalikan bobot sehingga diperoleh hasil indeks keterpulihan kawasan. Kemudian dari hasil indeks yang diperoleh dapat ditentukan kategori keterpulihan dengan interval sebagai berikut :

| NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | KATEGORI IKKR | KRITERIA PULIH |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1,00 – 1,75    | 25,00 – 43,75           | A             | BAHAYA         |
| 1,76 – 2,50    | 43,76 – 62,50           | B             | WASPADA        |
| 2,51 – 3,25    | 62,51 – 81,25           | C             | SIAGA          |
| 3,26 – 4,00    | 81,26 – 100,00          | D             | AMAN           |

Adapun rincian capaian IKKR tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4. Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Tahun 2022**

| NO | SATKER   | KRITERIA                             | Tingkat Kerawanan Hasil Pemetaan | IKKR         |
|----|----------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1  | BNNP NTT | Nilai IKKR Setelah Dikonversi        | 2.50                             | 3,14         |
|    |          | Nilai Interval Konversi Dikalikan 25 | 62.50                            | 78.50        |
|    |          | Kategori IKKR                        | <b>B</b>                         | <b>C</b>     |
|    |          | Kriteria Kawasan Rawan               | <b>Waspada</b>                   | <b>Siaga</b> |

Berdasarkan hasil survei indeks keterpulihan kawasan rawan narkoba di Kelurahan Oebobo Kota Kupang terhadap 15 responden (warga binaan dan stakeholder terkait) menunjukkan nilai IKKR sebesar 3,14 dengan kriteria Siaga. Berdasarkan hasil survei tersebut, kita dapat membandingkan dengan kondisi kerawanan pada awal pemetaan kawasan, dimana kategori kerawanan narkoba pada awal program berada di tingkat Waspada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat



kerawanan narkoba di Kelurahan Oebobo Kota Kupang pada akhir program menurun menjadi Siaga.

Adapun perhitungan capaian Nilai Keterpulihan Kawasan yang diintervensi sebagai berikut :

*Perhitungan capaian:*

|                  |   |                                                   |          |          |
|------------------|---|---------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>% Capaian</b> | : | $\frac{2.99 \text{ Indeks}}{3,14 \text{ Indeks}}$ | x 100% = | 105.01 % |
|------------------|---|---------------------------------------------------|----------|----------|

Dari data diatas Nilai Keterpulihan Kawasan yang diintervensi dengan target 2.99 Indeks, melampaui capaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.14 Indeks atau 105.01 %.

**e. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan pencapaian Nilai Keterpulihan Kawasan yang diintervensi dengan target 2.99 Indeks, melebihi capaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.14 Indeks atau 105,01% adalah :

- 1) Kawasan rawan yang diintervensi program pemberdayaan cukup responsif.
- 2) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebaran informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik.
- 3) Pendekatan program pemberdayaan alternatif yang dilakukan cukup efektif, efisien dan tepat sasaran karena melalui beberapa tahapan kegiatan dengan melibatkan stakeholder terkait antara lain : pemetaan potensi kawasan rawan, rapat sinergitas dengan stakeholder dan bimbingan teknis dengan stakeholder.
- 4) Stakeholder di kawasan rawan memiliki kepedulian dan komitmen dalam upaya pemulihan kawasan rawan secara berkelanjutan melalui penyebaran informasi P4GN, maupun pemberdayaan alternatif kelompok binaan di bidang pertanian hidroponik agar masyarakat memiliki aktifitas positif yang dapat menjadi aksi nyata di lingkungannya.



- 5) Tidak ada kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama intervensi program dan akan terus dimonitoring pada tahun berjalan.
- 6) Selain pemberdayaan alternatif, kawasan ini juga mendapatkan intervensi Rehabilitasi IBM dan Intervensi Desa Bersinar.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif juga mengalami beberapa kendala antara lain :

- 1) Anggaran yang tersedia hanya mampu memfasilitasi 15 Orang warga binaan, sementara masih banyak warga lainnya yang ingin mengikuti program kegiatan.
- 2) Waktu pelatihan yang direncanakan sangat singkat sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga kemampuan warga binaan dalam menciptakan produk masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan.
- 3) Tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam P4GN termasuk pengembangan kewirausahaan.
- 4) Minimnya kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Minimnya bantuan modal usaha, terutama dari dunia usaha/swasta, termasuk BUMN/BUMD untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Kurang adanya sinergi/sinkronisasi program serupa dari pemerintah daerah, sehingga dukungan anggaran dan pelaksanaan program hanya dari BNNP saja dan mitra pertanian hidroponik.

#### **d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba.
- 2) Kegiatan P4GN disisipkan pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada di tingkat desa/kelurahan.



- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk mendukung P4GN dengan regulasi.
- 4) Bermitra dengan yayasan/LSM/Lembaga swasta dalam pemulihan kawasan rawan melalui pengembangan kewirausahaan.

## 6.

### Indikator Kinerja : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

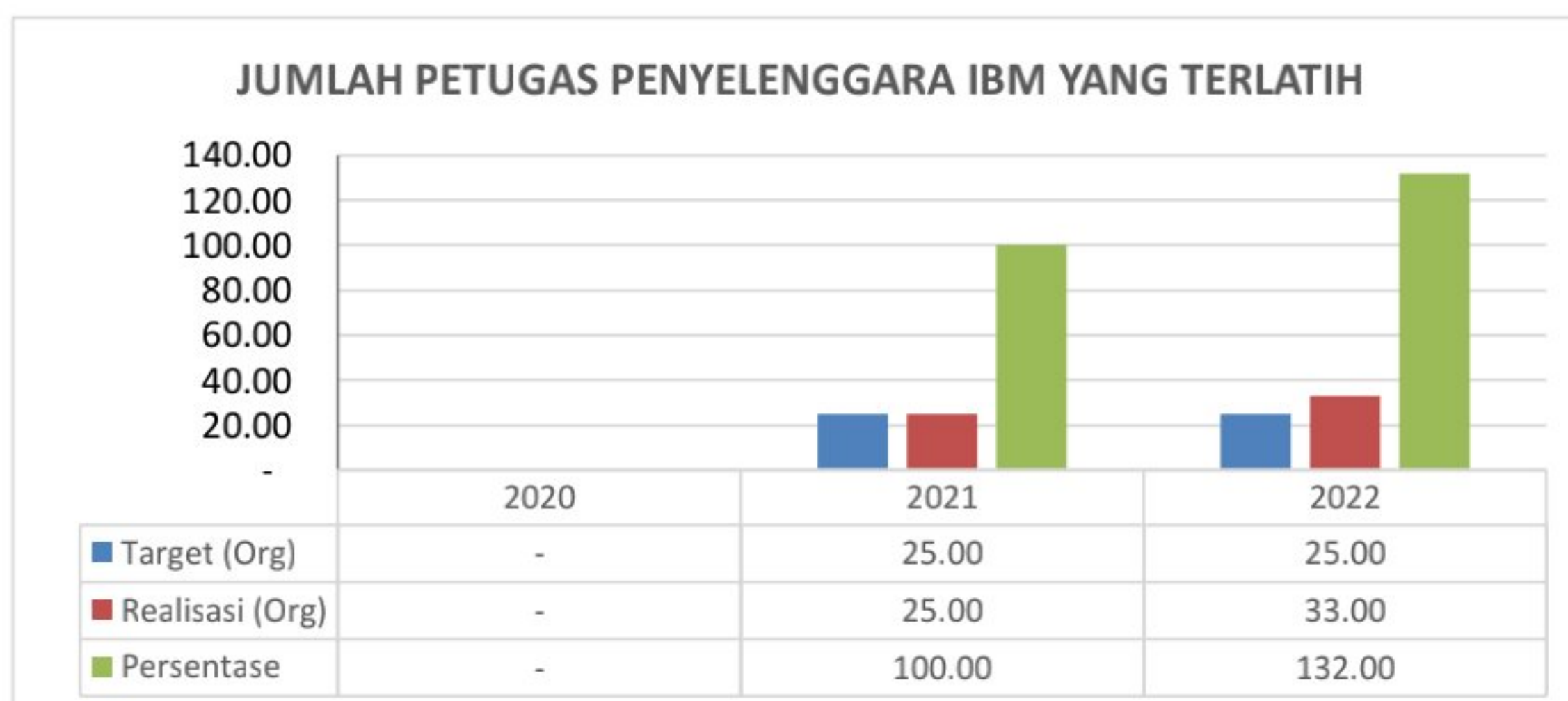
Definisi Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis.

#### a. Capaian indikator kinerja

Indikator kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 25 orang. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi melalui bimbingan teknis kepada 33 orang. Realisasi kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target sebesar 25 orang dengan capaian kinerja sebesar 33 orang atau 132% melebihi target kinerja yang ditetapkan.

| No | Indikator                                      | Target   | Realisasi | %     |
|----|------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1  | Jumlah Petugas Penyelenggara IBM yang terlatih | 25 Orang | 33 Orang  | 132 % |

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah Petugas Penyelenggara IBM yang terlatih tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.





**b. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan adalah Petugas IBM sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.

**c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Meningkatkan Sosialisasi program rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Wilayah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Memetakan kembali lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) agar operasional.

**7.**

**Indikator Kinerja : Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis**

Indikator kinerja Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis target 10 orang. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan sertifikasi petugas rehabilitasi Konselor Adiksi kepada 10 orang. Realisasi kinerja Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak 5 orang dengan persentase capaian kinerja sebesar 50 %, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

| No | Indikator                                                         | Target   | Realisasi | %    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| 1  | Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | 10 Orang | 5 Orang   | 50 % |



Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



**b. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor Kegagalan pencapaian target adalah Kurangnya Kompetensi Petugas Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Instansi Penerima Wajib Lapir yang bekerja sama dengan BNNP NTT jajaran.

**c. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi melalui pelatihan secara berkala tentang layanan rehabilitasi.

**8.**

**Indikator Kinerja : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi**

**a. Capaian indikator kinerja**

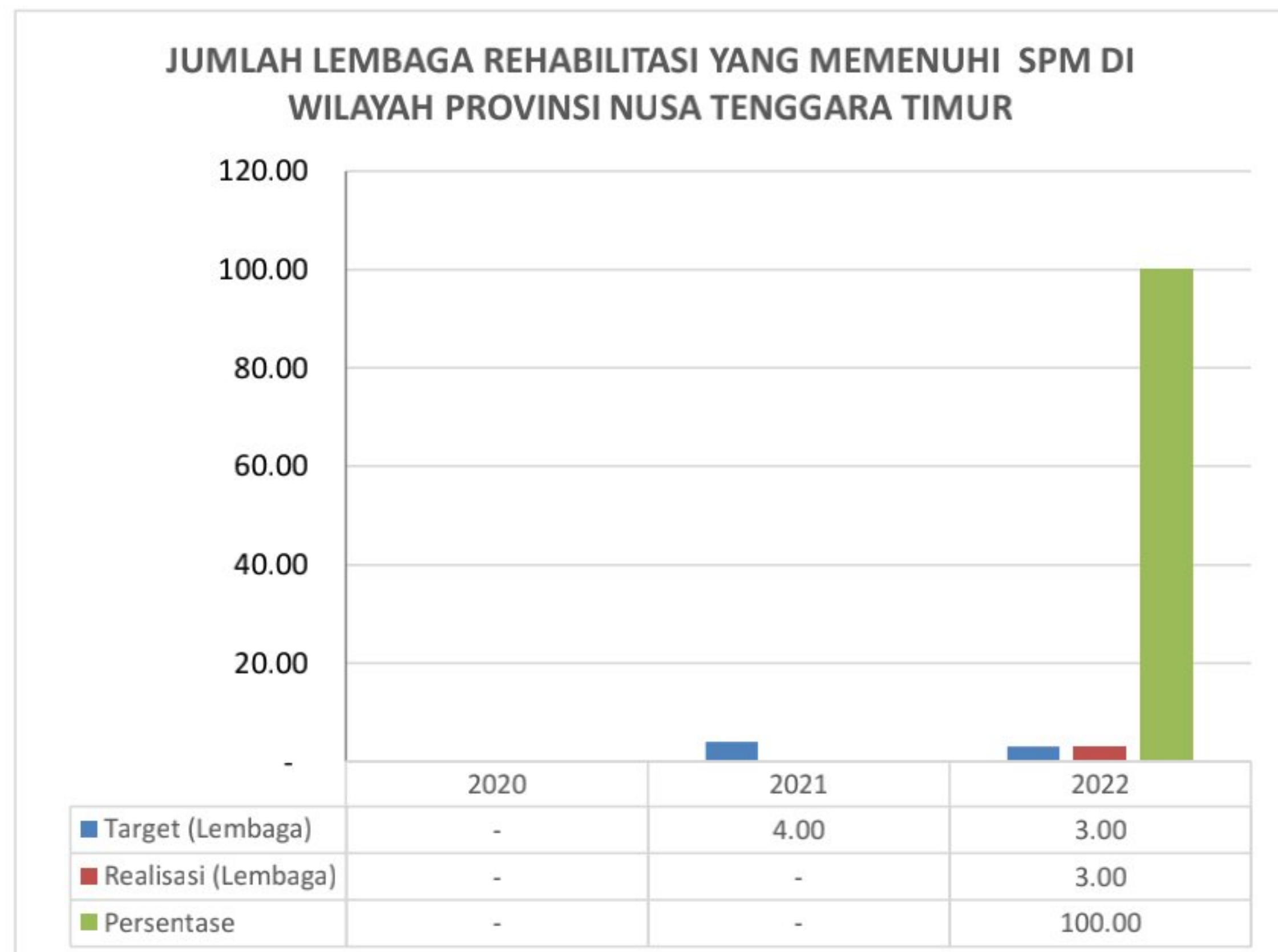
Indikator kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi target kinerja 3 lembaga. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama. Realisasi kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi NTT 3 lembaga dengan



persentase capaian kinerja sebesar 100%, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

| No | Indikator                                                                                     | Target    | Realisasi | %     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1  | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi | 3 lembaga | 3 Lembaga | 100 % |

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus. Pada komponen identitas dan data demografi lembaga berisi tentang data umum lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Pada komponen penilaian umum



terdapat 5 sub komponen yang menjadi dasar penilaian, yaitu kelembagaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan pada komponen penilaian khusus dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

*Perhitungan Capaian :*

|                  |   |                                               |          |       |
|------------------|---|-----------------------------------------------|----------|-------|
| <b>% Capaian</b> | : | $\frac{3 \text{ Lembaga}}{3 \text{ Lembaga}}$ | x 100% = | 100 % |
|------------------|---|-----------------------------------------------|----------|-------|

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan adalah ketiga lembaga yang dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan/bimtek dan dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana layanan lembaga rehabilitasi.

**9.**

**Indikator Kinerja : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi**

Layanan intervensi merupakan salah satu upaya IBM dalam rangka membantu klien mencapai dan memelihara pemulihannya dari ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkoba, melalui screening individu dengan melibatkan kelompok dampingan pemulihan.

**a. Capaian indikator kinerja**

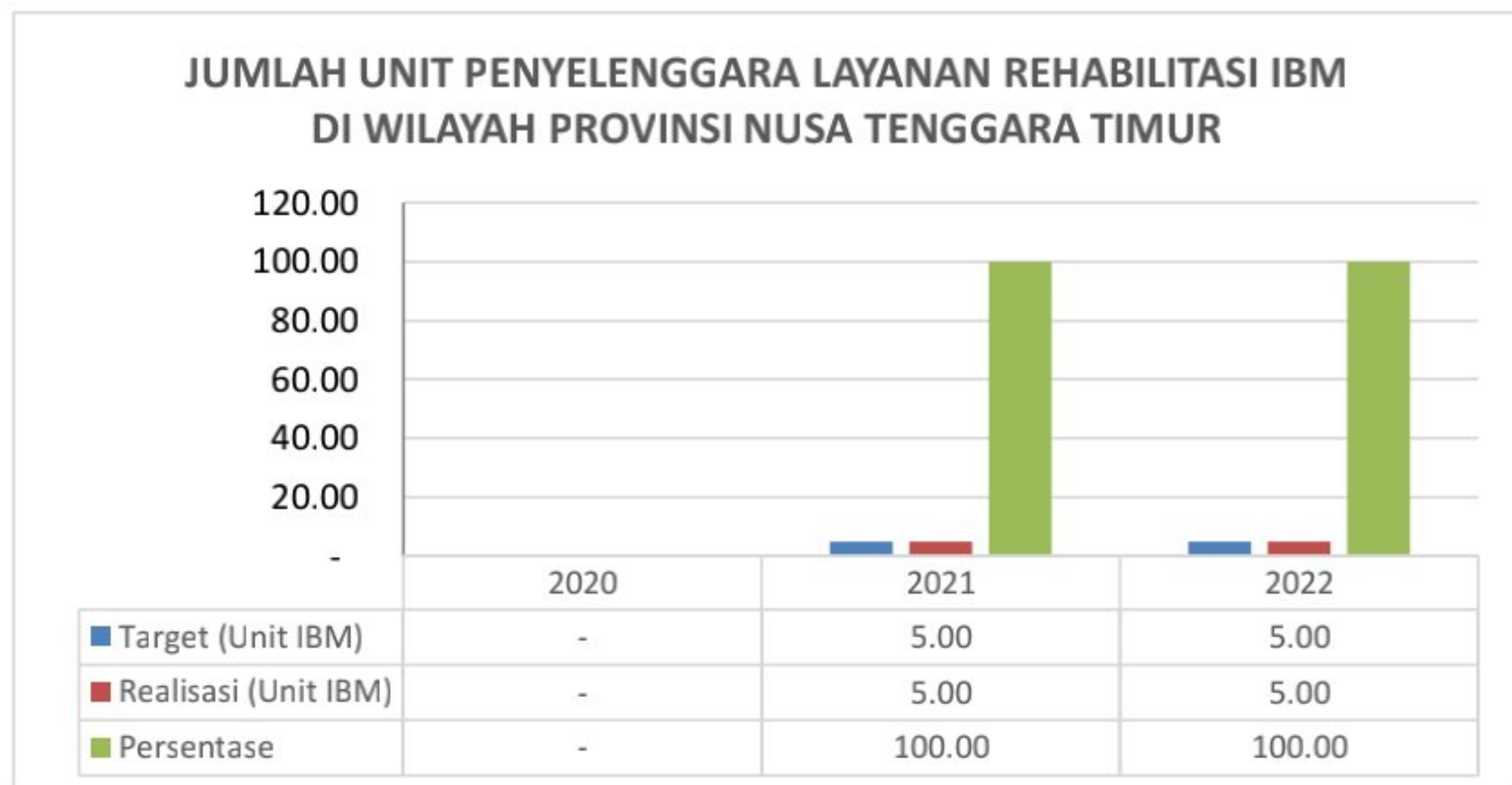
Indikator kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi target 5 unit. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Pembentukan unit IBM. Realisasi kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi



Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi sebesar 5 unit dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% , sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

| No | Indikator                                                                                               | Target | Realisasi | % Realisasi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi | 5 unit | 5 unit    | 100%        |

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



Target kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran dengan rincian sebagai berikut :

| No | BNNK        | Target | Realisasi | %   | Ket |
|----|-------------|--------|-----------|-----|-----|
| 1  | BNNP NTT    | 2      | 2         | 100 | -   |
| 2  | Belu        | 1      | 1         | 100 | -   |
| 3  | Kota Kupang | 1      | 1         | 100 | -   |
| 4  | Rote Ndao   | 1      | 1         | 100 | -   |



**b. Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan dengan pengukuran kualitas hidup kepada setiap klien dengan menggunakan formulir WHO-QOL dan URUCA. Peningkatan kualitas hidup berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrument rapor pemulihan mantan penyalah guna dan WHO-QoL. Dalam WHO-QoL mengukur 4 (empat) domain kehidupan mantan penyalah guna, yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Tujuan dilaksanakan pengisian WHO-QoL adalah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap mantan penyalahguna, yang dibandingkan pada awal dan akhir layanan pasca rehabilitasi.

*Perhitungan Capaian :*

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| $\% \text{ Capaian} : \frac{5 \text{ Unit}}{5 \text{ Unit}} \times 100\% = 100 \%$ |
|------------------------------------------------------------------------------------|

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan**

- 1) Kerjasama yang terjalin dengan baik dengan stakeholder turut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna.
- 2) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.
- 3) Komitmen yang tinggi dari para penyelenggara program rehabilitasi milik instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

- 1) Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) agar operasional.
- 2) Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba.
- 3) Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional.



**a. Capaian indikator kinerja**

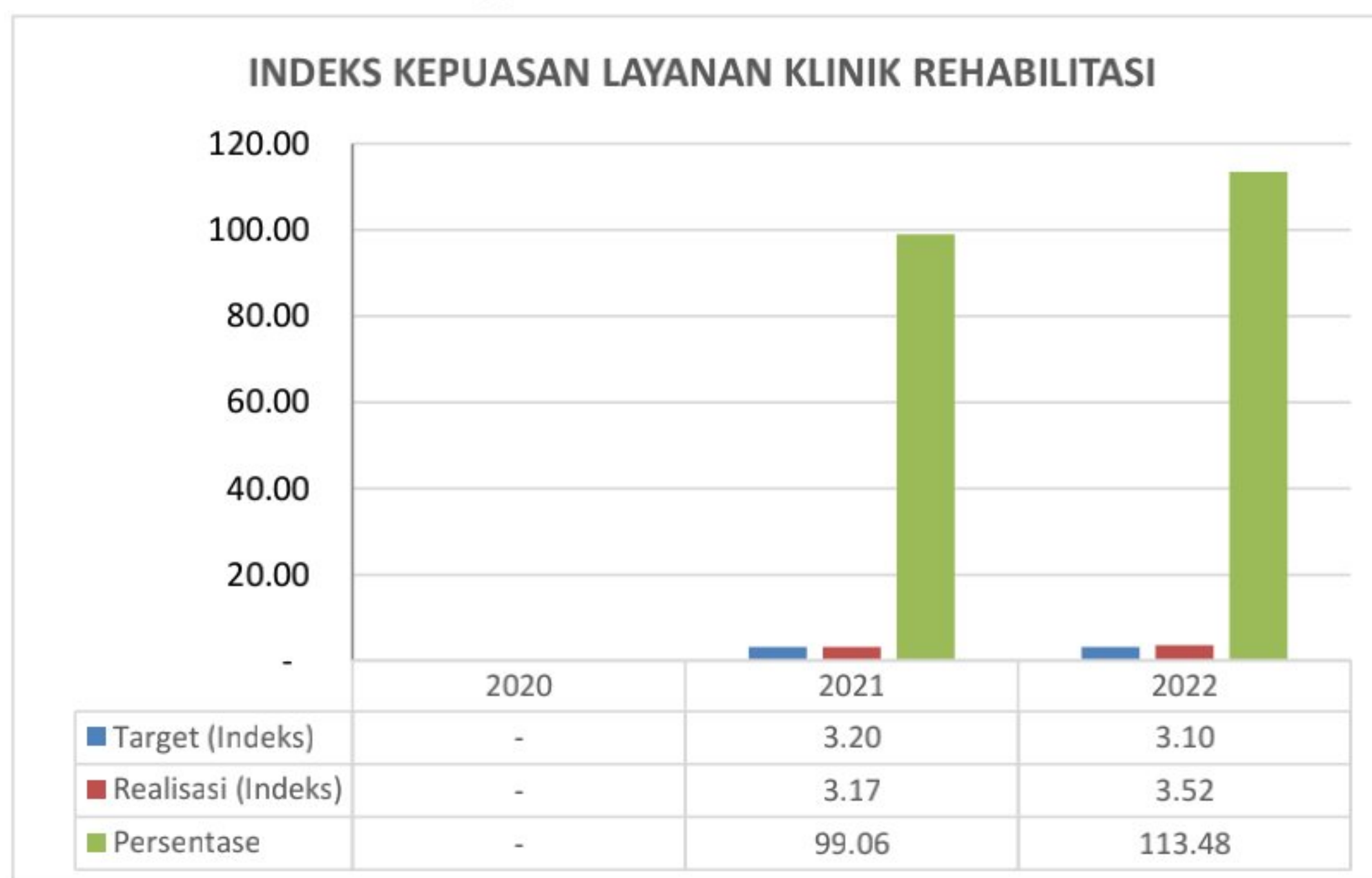
Indikator kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi target 3.1 Indeks sedangkan Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kab/Kota 3 Indeks . Untuk mendukung IKK tersebut Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama kepada masyarakat. Realisasi kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3.553 dengan persentase capaian kinerja sebesar 114.61 %, melebihi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian indikator kinerja Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

| No | Satker                           | Target        | Realisasi       | %<br>Realisasi |
|----|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1  | BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3.1<br>Indeks | 3.518<br>Indeks | 113.48         |
| 2  | BNN Kabupaten Belu               | 3 Indeks      | 3.400<br>Indeks | 113.33         |
| 3  | BNN Kota Kupang                  | 3 Indeks      | 3.729<br>Indeks | 124.30         |
| 4  | BNN Kabupaten Rote Ndao          | 3 Indeks      | 3.667<br>Indeks | 122.23         |

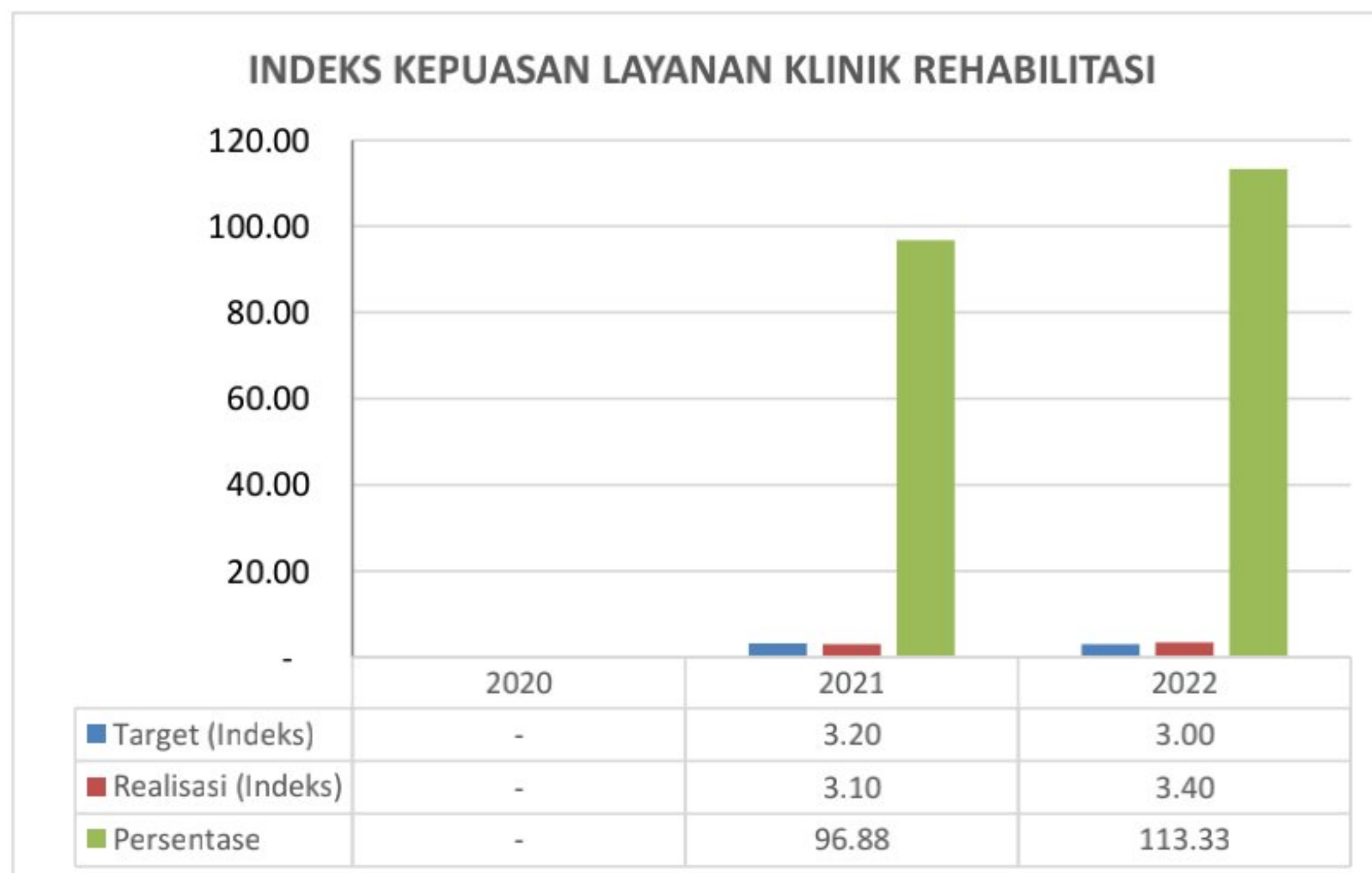


Berikut disajikan data pembandingan realisasi Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

#### 1. BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur



#### 2. BNN Kabupaten Belu

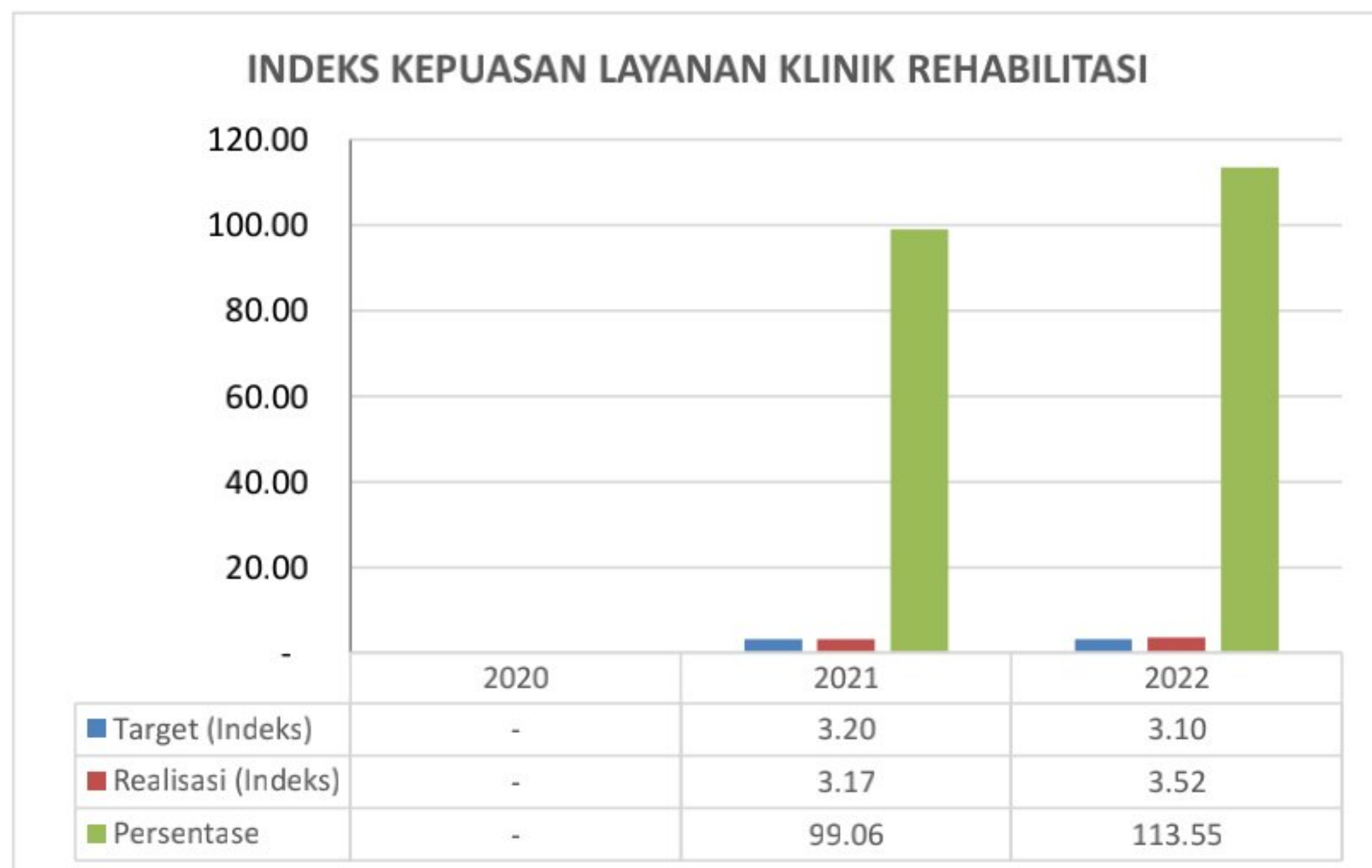




### 3. BNN Kota Kupang



### 4. BNN Kabupaten Rote Ndao





## b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan adalah melalui survey kepuasan atas pemberian layanan yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

*Perhitungan Capaian :*

|                  |   |                                                    |          |          |
|------------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>% Capaian</b> | : | $\frac{3.10 \text{ indeks}}{3.553 \text{ indeks}}$ | x 100% = | 114.61 % |
|------------------|---|----------------------------------------------------|----------|----------|

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Informasi mengenai layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTT sudah di respon oleh masyarakat. Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.

## d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTT dengan cara secara aktif melakukan sosialisasi.

**11.**

## Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang P-21

Kegiatan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja melalui Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil output capaian kinerja dalam bentuk jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan sampai dengan P-21 dan tahap II (penyerahan berkas perkara dan barang bukti) ke JPU.

### a. Capaian indikator kinerja

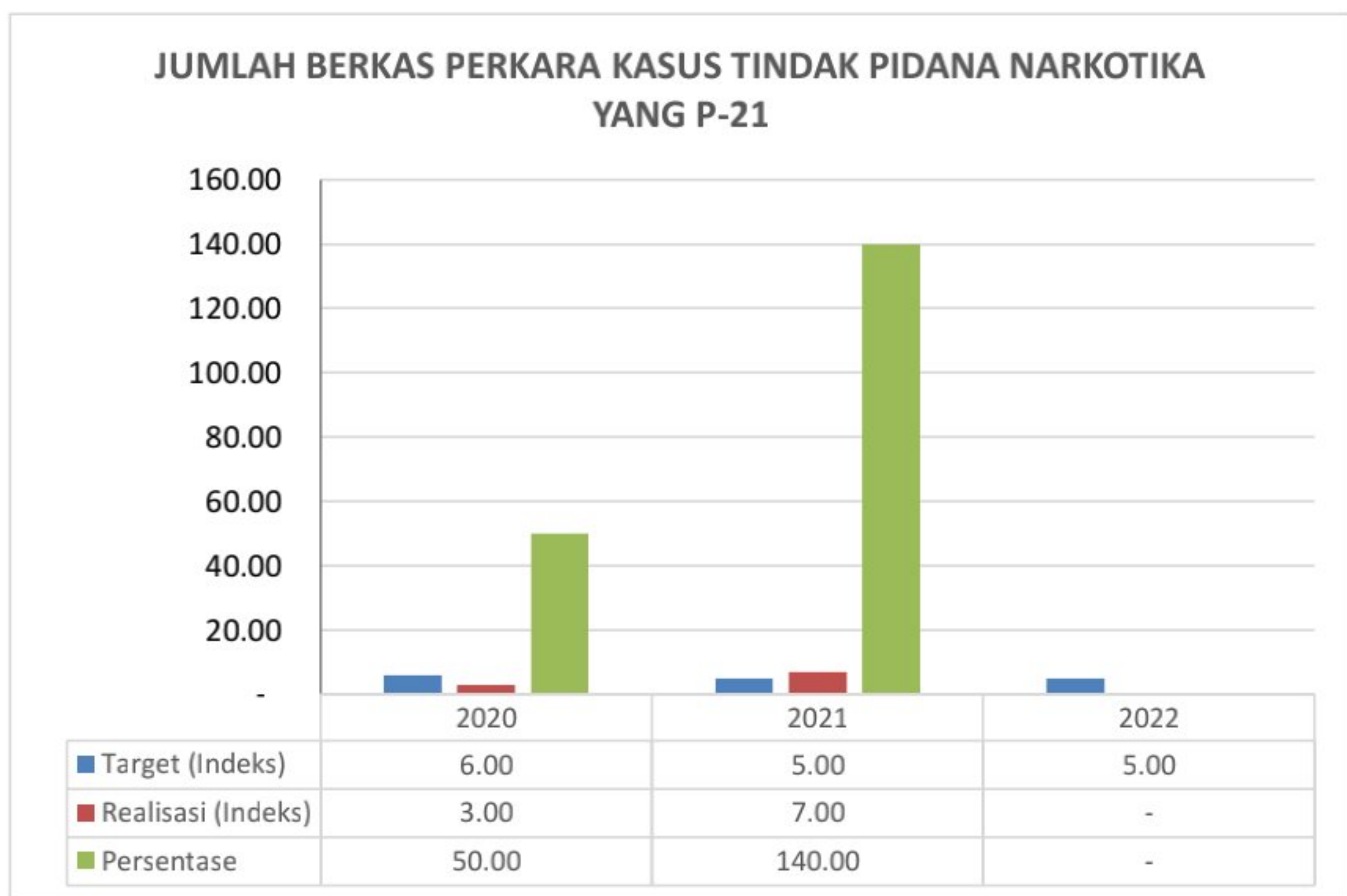
Perjanjian kinerja dengan target jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang P-21 dan tahap II ( penyerahan tersangka dan barang bukti) ke JPU, sebanyak 5 berkas perkara. Untuk mendukung IKK



tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Realisasi kinerja tidak mencapai target kinerja atau dengan persentase 0 %. Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut :

| No | Indikator                                                           | Target           | Realisasi        | % Realisasi |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1  | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P21) | 5 berkas perkara | 0 berkas perkara | 0 %         |

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkoba Yang P-21 tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.





## b. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan atau ditentukan berdasarkan proses pengungkapan dan penyesuaian kasus yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemberantasan, penyerahan berkas perkara (tahap I) ke JPU dan P-21 serta tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti, sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

|           |   |  |                  |              |
|-----------|---|--|------------------|--------------|
| % Capaian | : |  | 5 berkas perkara | x 100% = 0 % |
|           | : |  | 0 berkas perkara |              |

Realisasi kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 sebesar 0 berkas perkara dengan persentase capaian kinerja sebesar 0 %, tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

## c. Faktor Penyebab Kegagalan

- 1) Letak geografis wilayah NTT, merupakan daerah kepulauan sehingga untuk mendapatkan kepastian informasi terhadap suatu target (TO) membutuhkan waktu beberapa hari dan anggaran yang memadai untuk sampai di daerah atau TKP tersebut.
- 2) Peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi NTT, dikategorikan masih sepi karena kehidupan ekonomi, masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat sangat rendah, dimana harga narkoba untuk wilayah NTT sangat mahal (2,7 juta/gram). Sehingga daya beli masyarakat rendah, dan yang mampu membeli hanya kalangan ekonomi menengah keatas yang berduit saja yang mampu membelinya, sedangkan masyarakat lokal kebanyakan mengkonsumsi minuman lokal (miras) yang berupa sopi untuk memabukkan diri.
- 3) Tidak didukung alat *narco test* dan alat test urine di bidang pemberantasan sehingga sulit untuk dilakukan pendeteksian awal pada saat operasi malam dan penangkapan.



- 4) Tidak tersedia *spy cam* (kamera tersembunyi) yang digunakan pada saat pemeriksaan untuk merekam semua pembicaraan tersangka pada saat diperiksa.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam upaya meningkatkan jumlah capaian target berupa berkas perkara tindak pidana narkoba, maka BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan rencana aksi dan strategi kedepan sebagai berikut :

- 1) Harus adanya peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, khususnya ketika peredaran gelap narkoba yang terjadi di laut.
- 2) Harus adanya peningkatan kemampuan intelijen penyelidikan dan penyidik untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah NTT, khususnya penyelidikan intelijen yang berbasis IT.
- 3) Adanya peningkatan sistem koordinasi dengan instansi lain terkait jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah NTT.

## 12.

### Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban Dan Kesehatan Tahanan

**a. Capaian indikator kinerja**

Kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan dengan target 100 indeks. Capaian indicator kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 terhadap pelaksanaan keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan sebesar 0 indeks atau 0 %, dengan rincian capaian sebagai berikut :

| No | Indikator                                                 | Target     | Realisasi | % Realisasi |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1  | Nilai tingkat keamanan , ketertiban dan kesehatan tahanan | 100 indeks | 0 indeks  | 0%          |



Berikut disajikan data pembandingan Indeks Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban Dan Kesehatan Tahanan tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



#### b. Metode Pengukuran

Dengan menggunakan metode pengukuran :

- 1) Jumlah tahanan yang masuk sama dengan jumlah tahanan yang keluar, termasuk keamanan, ketertiban, dan kesehatan terhadap tahanan mulai dari awal proses penahanan sampai dengan tahap II
- 2) proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU.
- 3) Dengan rincian capaian sebagai berikut :

| NO | Kasus          | Jml Tahanan | Kesehatan | Nilai    |
|----|----------------|-------------|-----------|----------|
| 1  | Tahanan Masuk  | 0           | 0         | 0        |
| 2  | Tahanan Keluar | 0           | 0         | 0        |
|    | <b>Nilai</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> |

*Perhitungan Capaian :*

|                  |   |                                               |        |     |
|------------------|---|-----------------------------------------------|--------|-----|
| <b>% Capaian</b> | : | $\frac{100 \text{ indeks}}{0 \text{ indeks}}$ | x 0% = | 0 % |
|------------------|---|-----------------------------------------------|--------|-----|

Dari data perhitungan tersebut diatas, maka nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, target kinerja tidak tercapai atau 0 %.

#### c. Faktor Penyebab Kegagalan

Tidak adanya kasus penyalagunaan narkoba yang terungkap di Tahun 2022.



**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Untuk meningkatkan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, maka BNNP NTT dan BNNK/Kota akan melakukan rencana aksi dan strategi adalah :

- 1) Melakukan pengungkapan kasus penyalagunaan narkoba yang terungkap di Tahun 2023.
- 2) Peningkatan kemampuan personil dalam Penyidikan Jaringan Peredaran Narkoba dan pengawasan tahanan melalui pembinaan, Pendidikan dan latihan khusus pengawasan tahanan.

**13.**

**Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti  
Narkotika dan Non Narkotika**

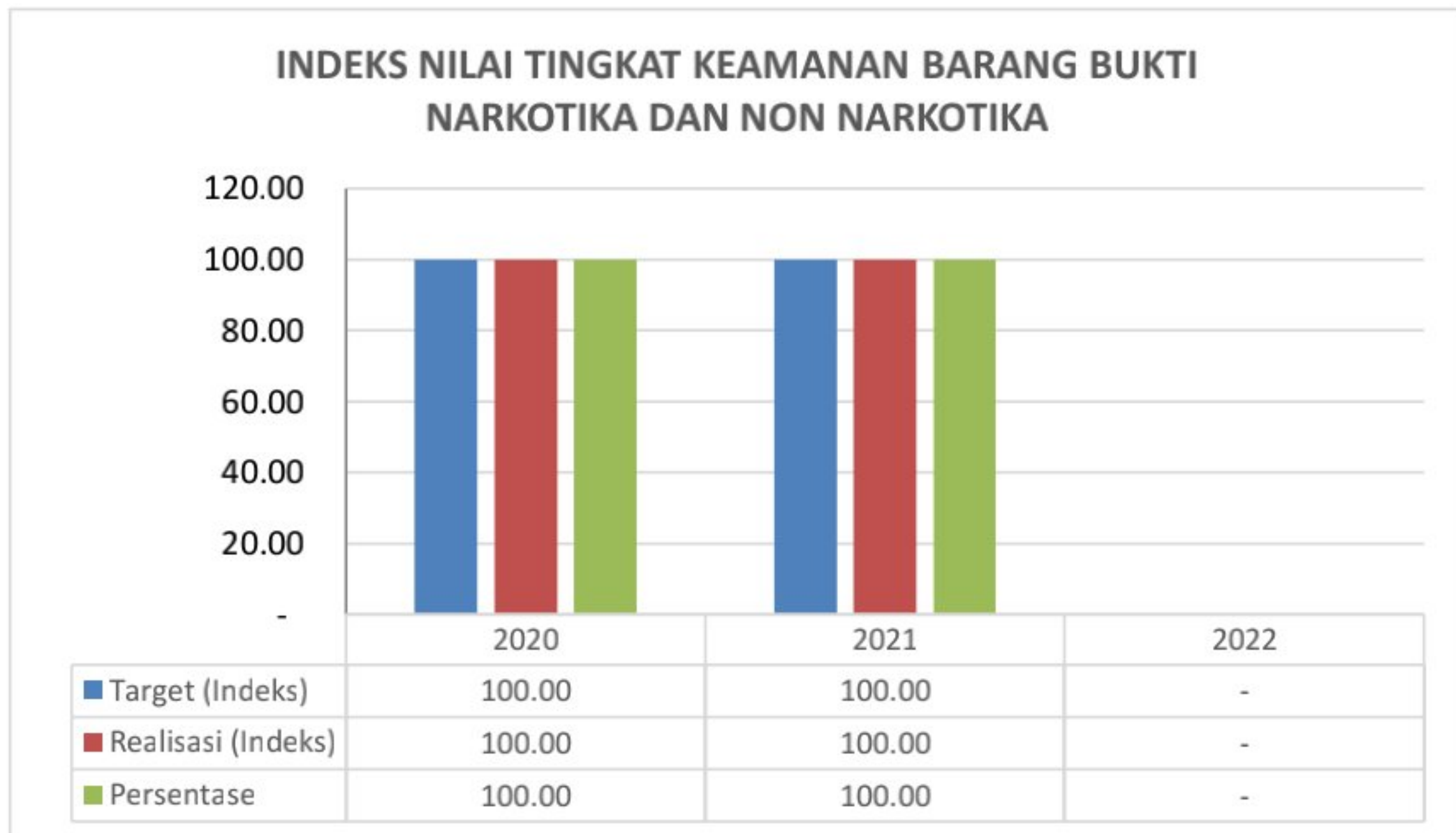
**a. Capaian indikator kinerja**

Target kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti dan non barang bukti dengan target 100 indeks. Capaian kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 terhadap nilai tingkat keamanan barang bukti dan non barang bukti 0 indeks atau 0% tidak mencapai target kinerja, dengan rincian nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba sebagai berikut :

| No | Indikator                                                   | Target     | Realisasi | % Realisasi |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1  | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba | 100 indeks | 0 indeks  | 0%          |



Berikut disajikan data pembandingan Indeks Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



#### b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah: jumlah barang bukti yang masuk, yang disita, berdasarkan surat perintah penyitaan terhadap barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh pimpinan, sama dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan dan disisihkan untuk lain-lain sesuai yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

| NO | Barang bukti | Barang bukti masuk | Barang bukti dimusnahkan & Untuk keperluan lain (Sesuai UU 35 Tahun 2009) |
|----|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | -            | -                  | -                                                                         |
| 2  | -            | -                  | -                                                                         |

*Perhitungan :*

|           |   |                                               |              |
|-----------|---|-----------------------------------------------|--------------|
| % Capaian | : | $\frac{100 \text{ indeks}}{0 \text{ indeks}}$ | x 100% = 0 % |
|-----------|---|-----------------------------------------------|--------------|



Dari data perhitungan tersebut diatas, maka nilai keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba realisasi capaian kinerja 0 Indeks atau 0 %, tidak mencapai target kinerja.

**c. Faktor Penyebab Kegagalan**

Tidak adanya kasus penyalagunaan narkoba yang terungkap di Tahun 2022.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Untuk meningkatkan keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba akan melakukan rencana aksi dan strategi adalah:

- 1) melakukan pengungkapan kasus penyalagunaan narkoba yang terungkap di Tahun 2023
- 2) Peningkatan kemampuan personil dalam dalam Penyidikan Jaringan Peredaran Narkoba serta mengurus dan mengamankan BB, baik itu narkoba maupun non narkoba.

**14.**

**Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNN**

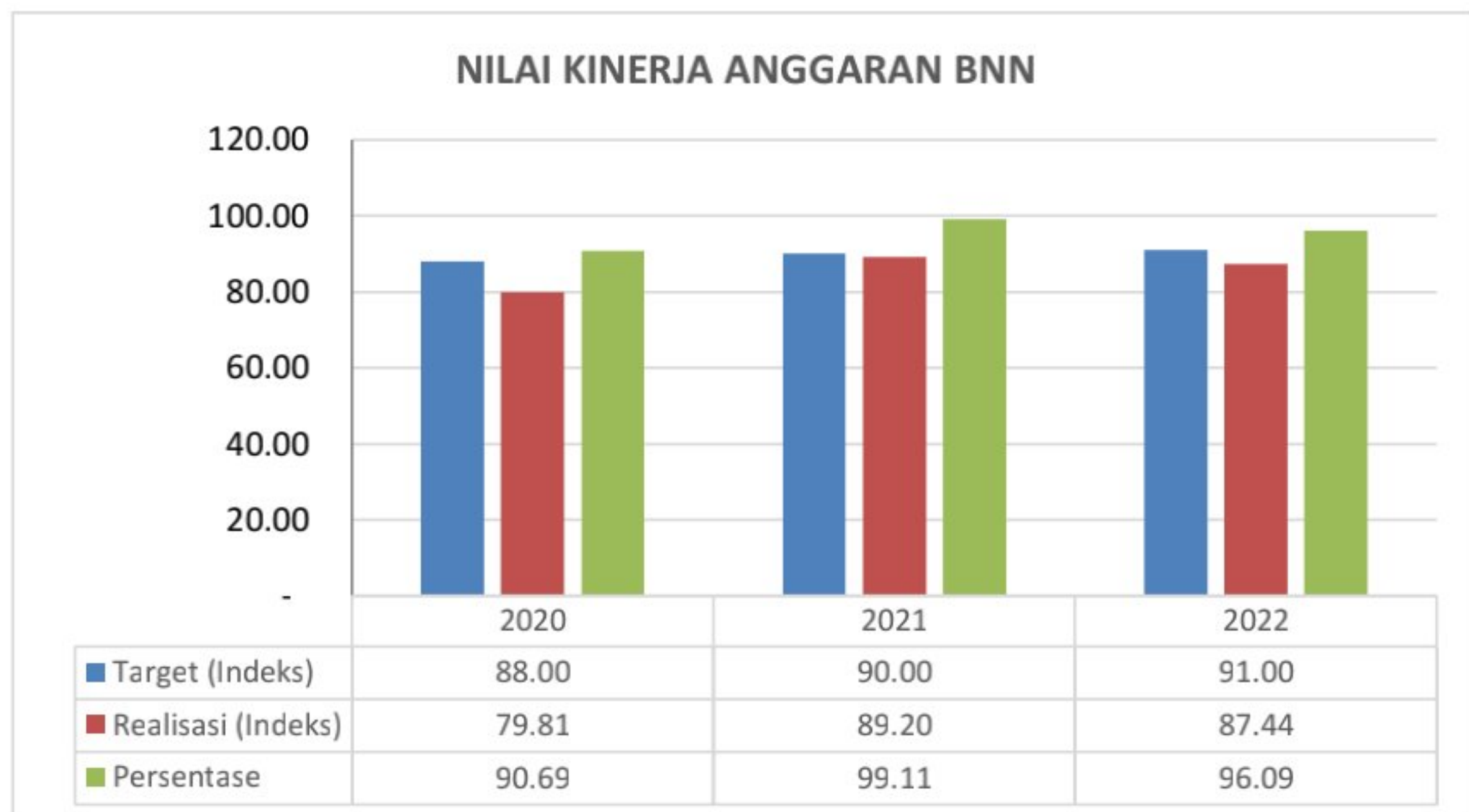
**a. Capaian indikator kinerja**

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN target Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur target 91 Indeks. Sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja data *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan Tahun 2022 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 87.44 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 96.20%, tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan.

| No | Indikator                  | Target    | Realisasi    | % Realisasi |
|----|----------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | Nilai Kinerja Anggaran BNN | 91 indeks | 87.44 indeks | 96.09%      |



Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan, efisiensi dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi Smart Kementerian Keuangan (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), dengan rincian capaian sebagai berikut :

**Tabel Capaian Kinerja Aspek Implementasi (data smart Kemenkeu Tahun 2022)**

| Capaian Kinerja Aspek Implementasi |          |                     |             |                           |           |                 |                    |
|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| No                                 | Satker   | Penyerapan Anggaran | Konsistensi | Capaian Keluaran Kegiatan | Efisiensi | Nilai Efisiensi | Pencapaian Kinerja |
| 1                                  | BNNP NTT | 93.88               | 86.23       | 100                       | 6.67      | 67.18           | 87.44.             |

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.



- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

**15.**

**Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target**

**a. Capaian indikator kinerja**

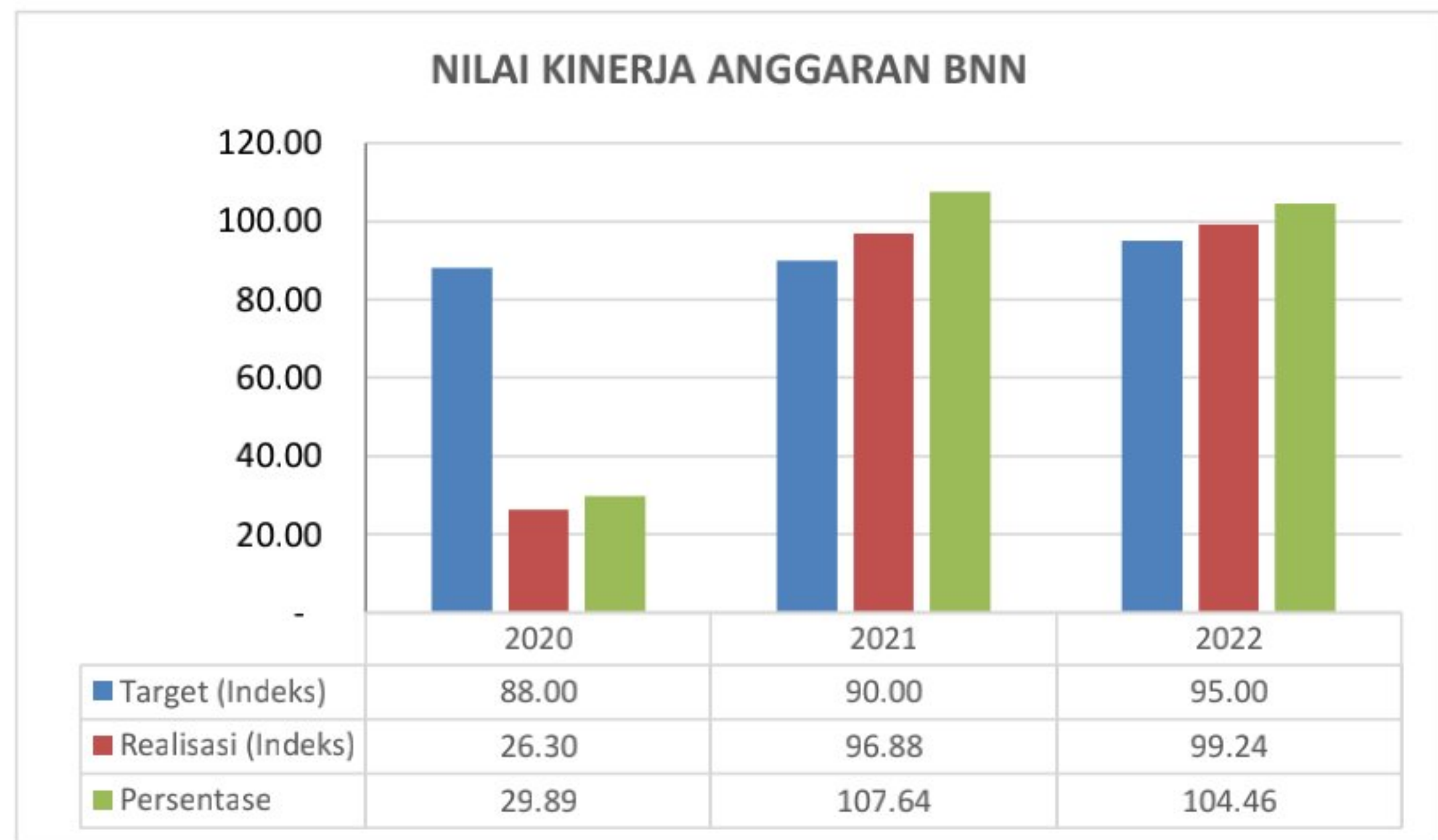
Indikator kinerja Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan nilai kinerja anggaran BNN, target : 1).BNN Kabupaten Belu target 95 Indeks; 2). BNN Kota Kupang target 88 Indeks; dan 3). BNN Kabupaten Rote Ndao target 88 Indeks. Sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja data *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian, realisasi indikator kinerja Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target 3 BNN Kab/Kota sebesar 33.33 % atau 1 (satu) BNN Kab/Kota yang mencapai indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN dan 2 (dua) BNN Kab/Kota tidak mencapai indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN. Data target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi mencapai target sebagai berikut :

| No | Satker                  | Target    | Realisasi    | % Realisasi |
|----|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | BNN Kabupaten Belu      | 95 indeks | 99.24 indeks | 104.46%     |
| 2  | BNN Kota Kupang         | 88 indeks | 86.42 indeks | 98.20%      |
| 3  | BNN Kabupaten Rote Ndao | 88 indeks | 86.61 indeks | 98.41%      |

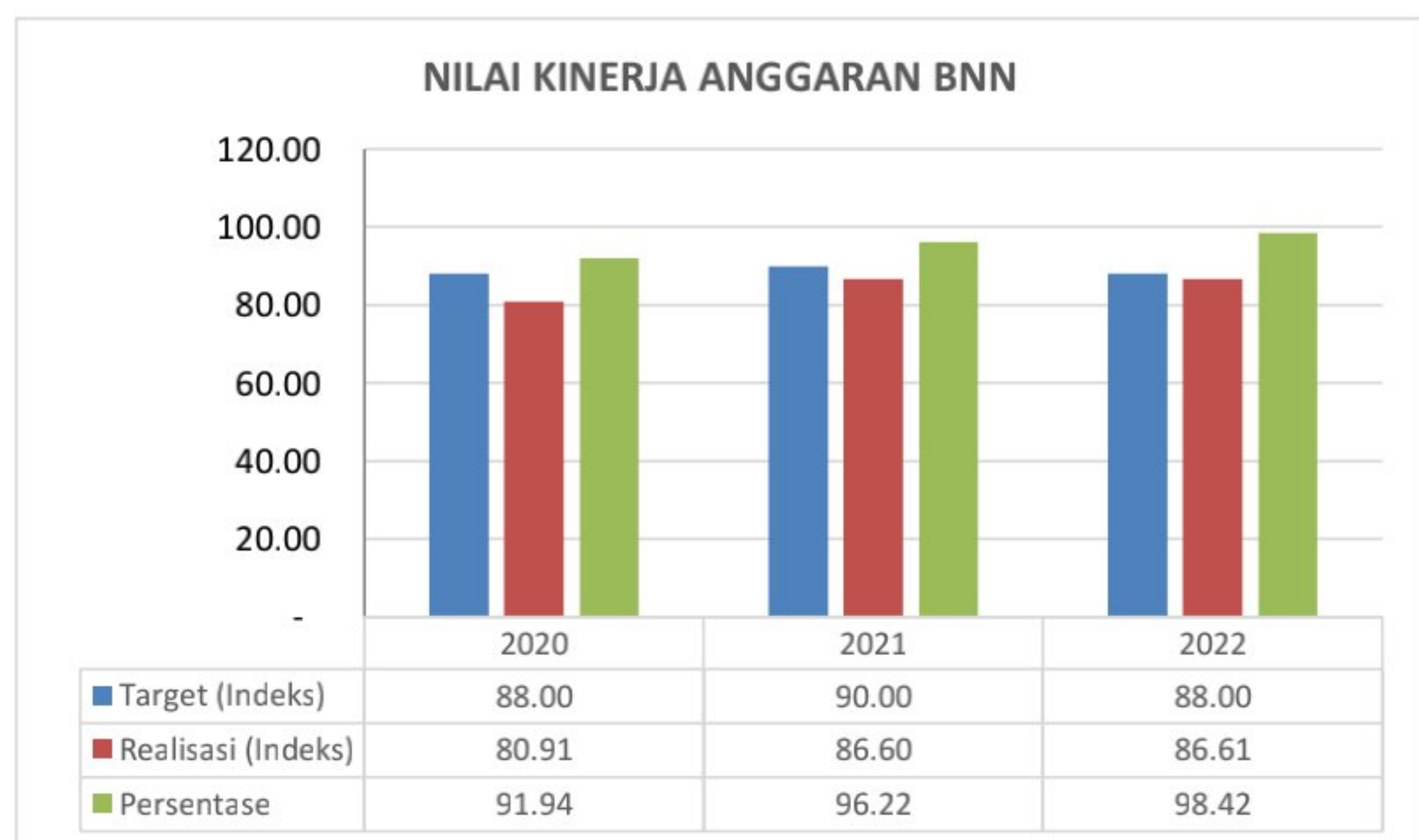


Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN Kab/Kota tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

#### 1. BNN Kabupaten Belu

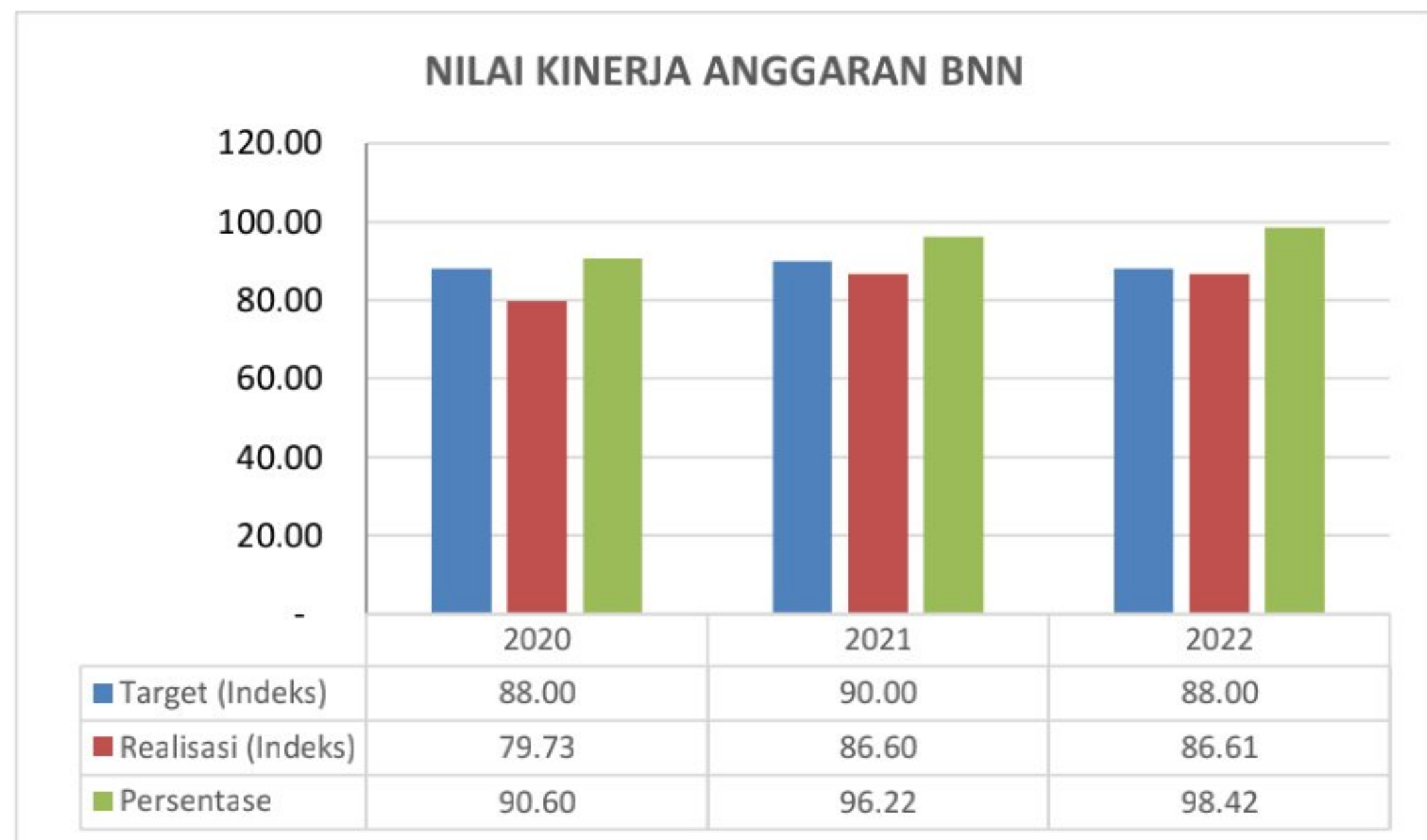


#### 2. BNN Kota Kupang





### 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



#### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai kinerja anggaran adalah dilihat dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran kegiatan, efisiensi dan nilai efisiensi yang tersedia pada aplikasi Smart Kementerian Keuangan (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu). dengan rincian capaian Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target sebagai berikut :

*Perhitungan Capaian :*

$$\text{Realisasi: } \frac{3 \text{ Kab/Kota}}{1 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 33.33 \%$$

#### c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.



#### d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

## 16. Indikator Kinerja : Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

#### a. Capaian indikator kinerja

Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Target kinerja 95 Indeks . Sesuai dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, IKPA BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 97.46 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.59 %, melebihi target yang telah ditetapkan. Data Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA.2022 :

| No | Indikator                                                   | Target    | Realisasi    | % Realisasi |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 95 indeks | 97.46 indeks | 102.59%     |

Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.





## b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

*Perhitungan Capaian:*

|            |                                                  |                           |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Realisasi: | $\frac{95 \text{ Indeks}}{97.46 \text{ Indeks}}$ | $\times 100\% = 102.56\%$ |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|

## c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

## d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

**17.**

**Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target**

## a. Capaian indikator kinerja

Nilai Kinerja Indikator Kinerja Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 3 BNN Kab/Kota. Sesuai

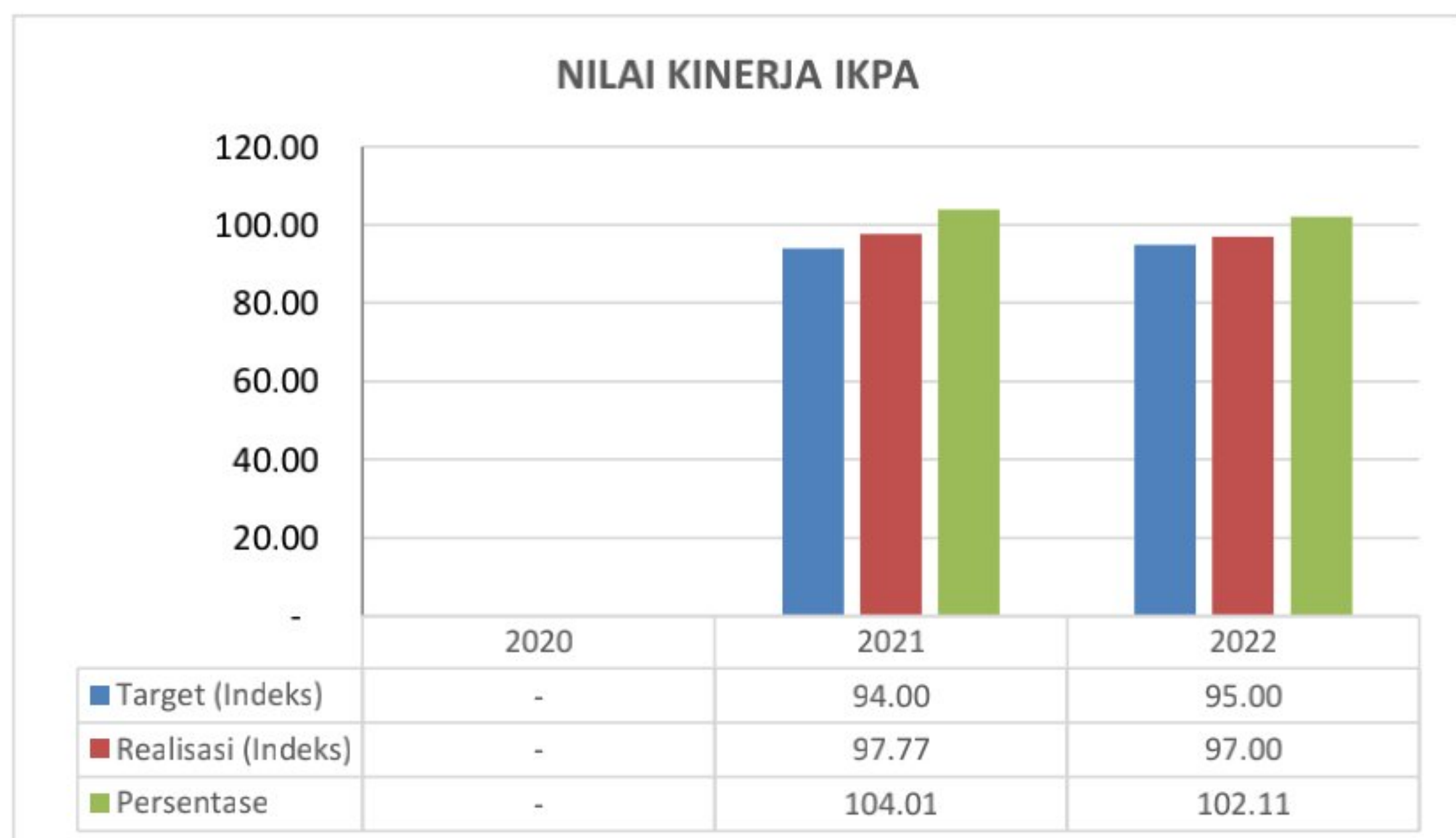


dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan pada ketiga Satker BNN Kab/Kota realisasi IKPA ketiga BNN Kab/Kota yaitu BNN Kabupaten Belu, BNN Kota Kupang dan BNN Kabupaten Rote Ndao melebihi dari target IKPA yang telah ditetapkan. Data Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing BNN Kab/Kota Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur TA.2022 :

| No | Satker                  | Target    | Realisasi    | % Realisasi |
|----|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | BNN Kabupaten Belu      | 95 indeks | 97.00 indeks | 102.11%     |
| 2  | BNN Kota Kupang         | 95 indeks | 97.47 indeks | 102.60%     |
| 3  | BNN Kabupaten Rote Ndao | 95 indeks | 97.31 indeks | 102.43%     |

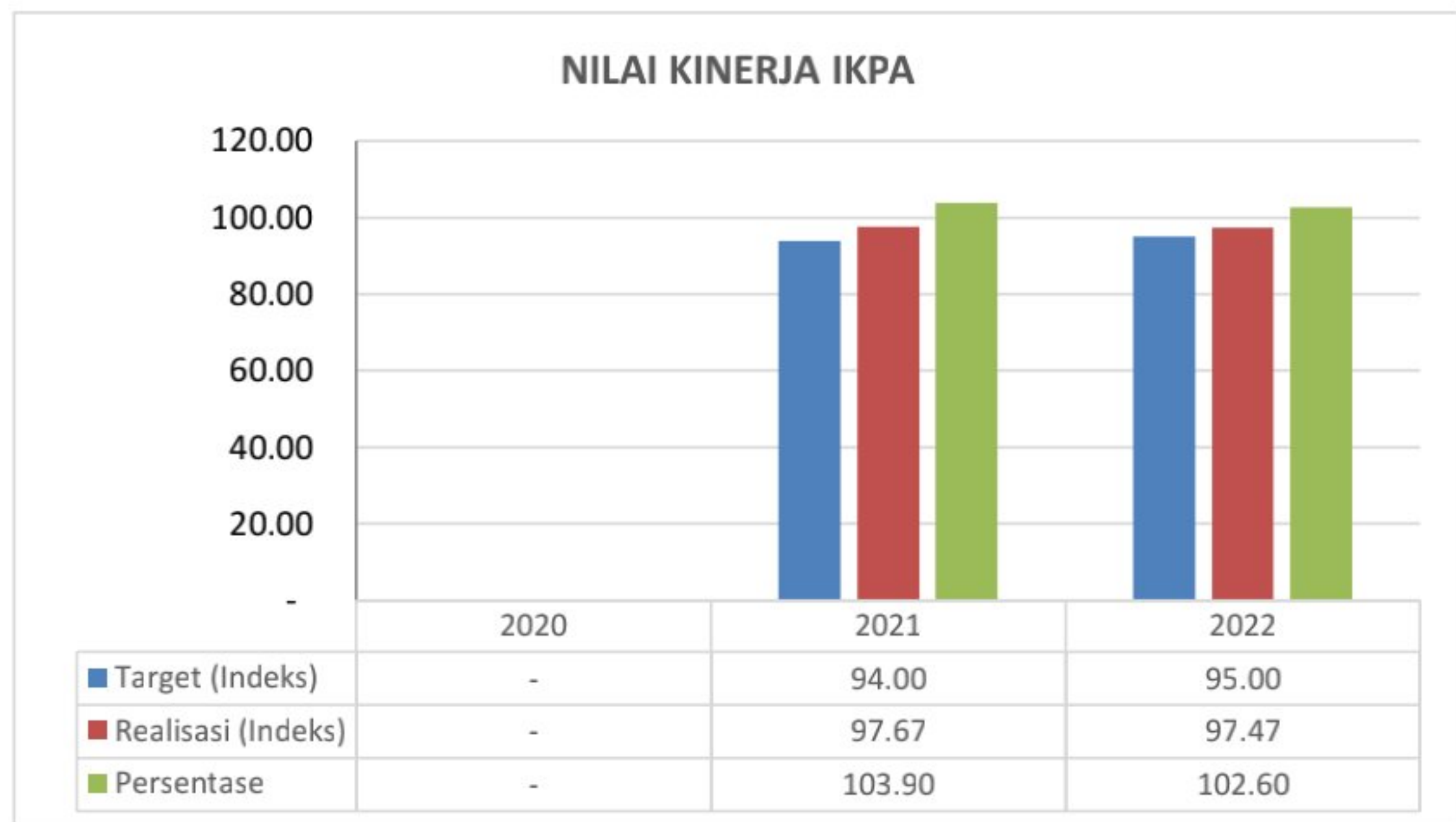
Berikut disajikan data pembandingan realisasi Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing BNN Kab/Kota Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

#### 1. BNN Kabupaten Belu

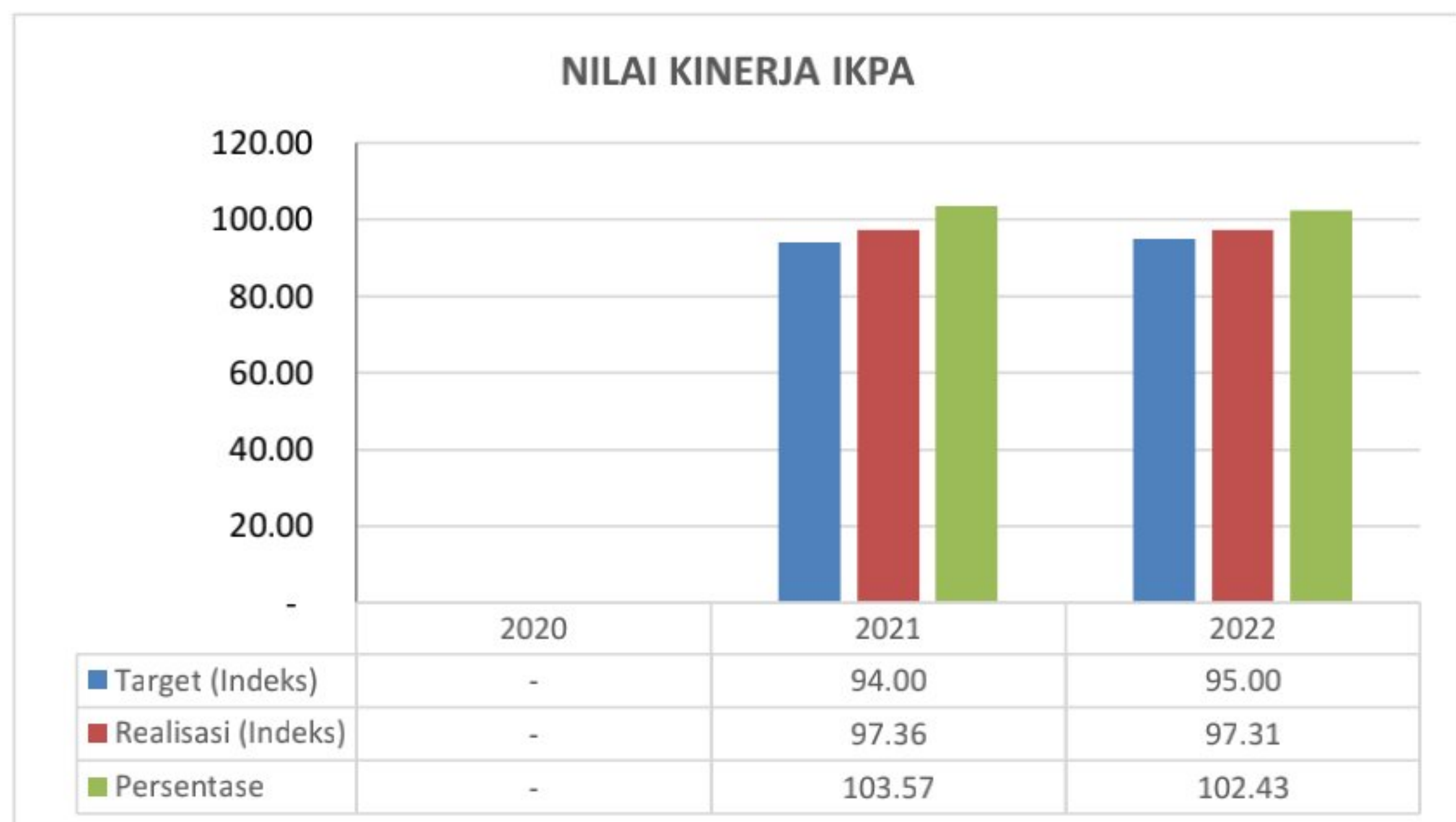




## 2. BNN Kota Kupang



## 3. BNN Kabupaten Rote Ndao



### b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.



Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target :

Perhitungan:

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Realisasi: } \frac{3 \text{ Kabupaten/Kota}}{3 \text{ Kabupaten/Kota}} \times 100\% = 100\%$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

**d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan**

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

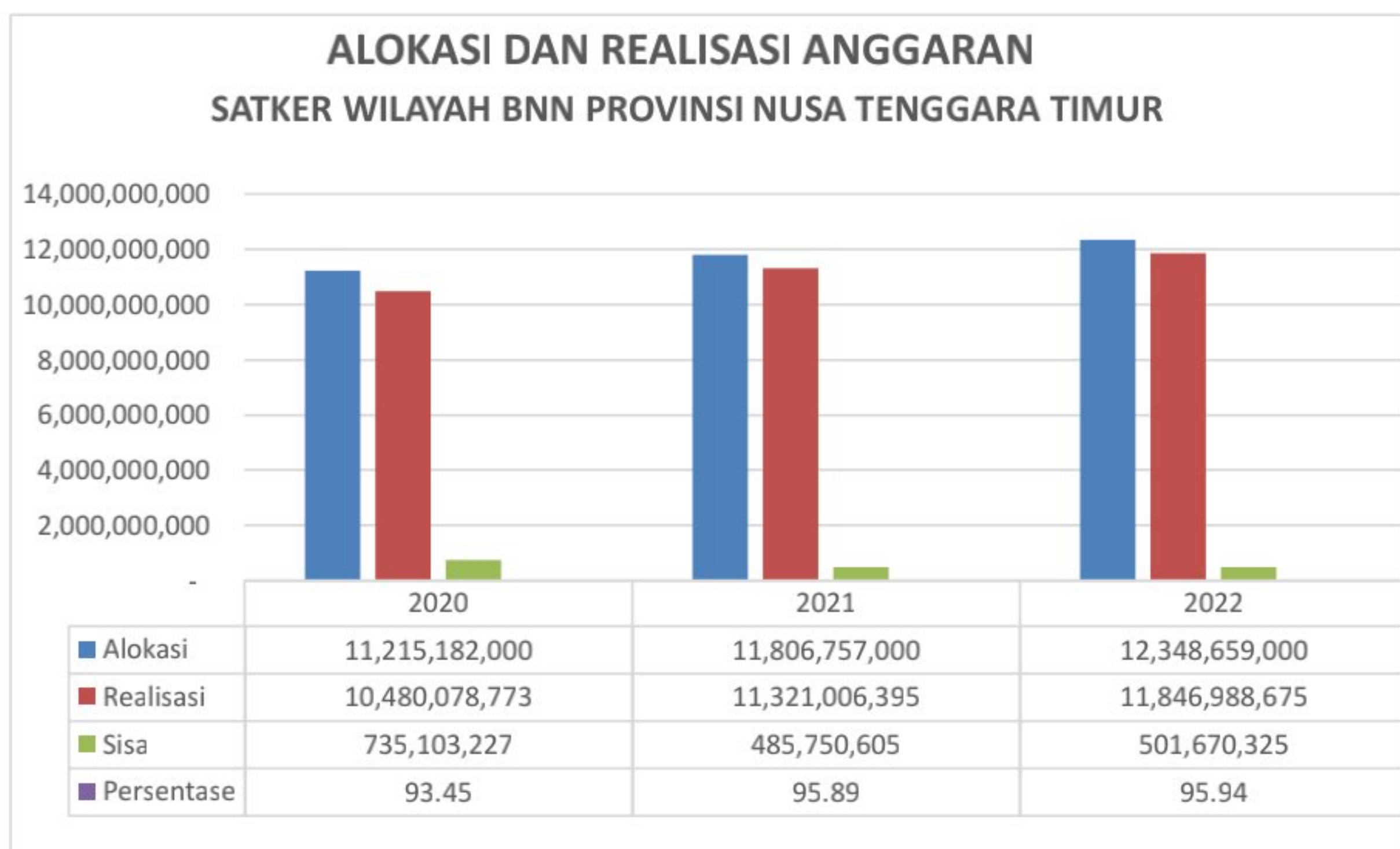
- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.



## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 12.348.659.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.792.195.075,- atau setara dengan 95.49 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. Rp. 556.463.925,- atau setara dengan 4.51 % anggaran yang tidak terserap.

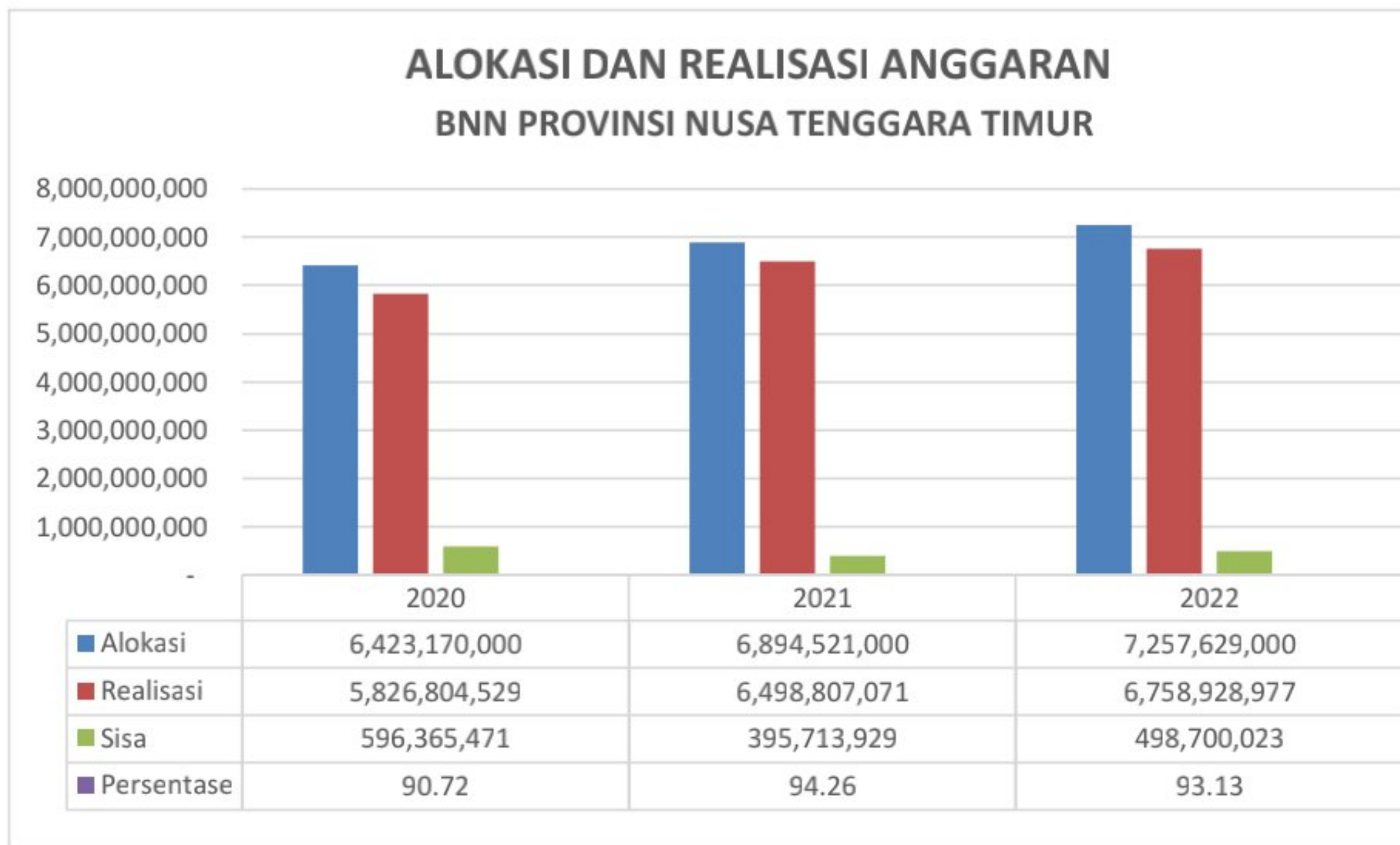
Data pembandingan realisasi anggaran Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :



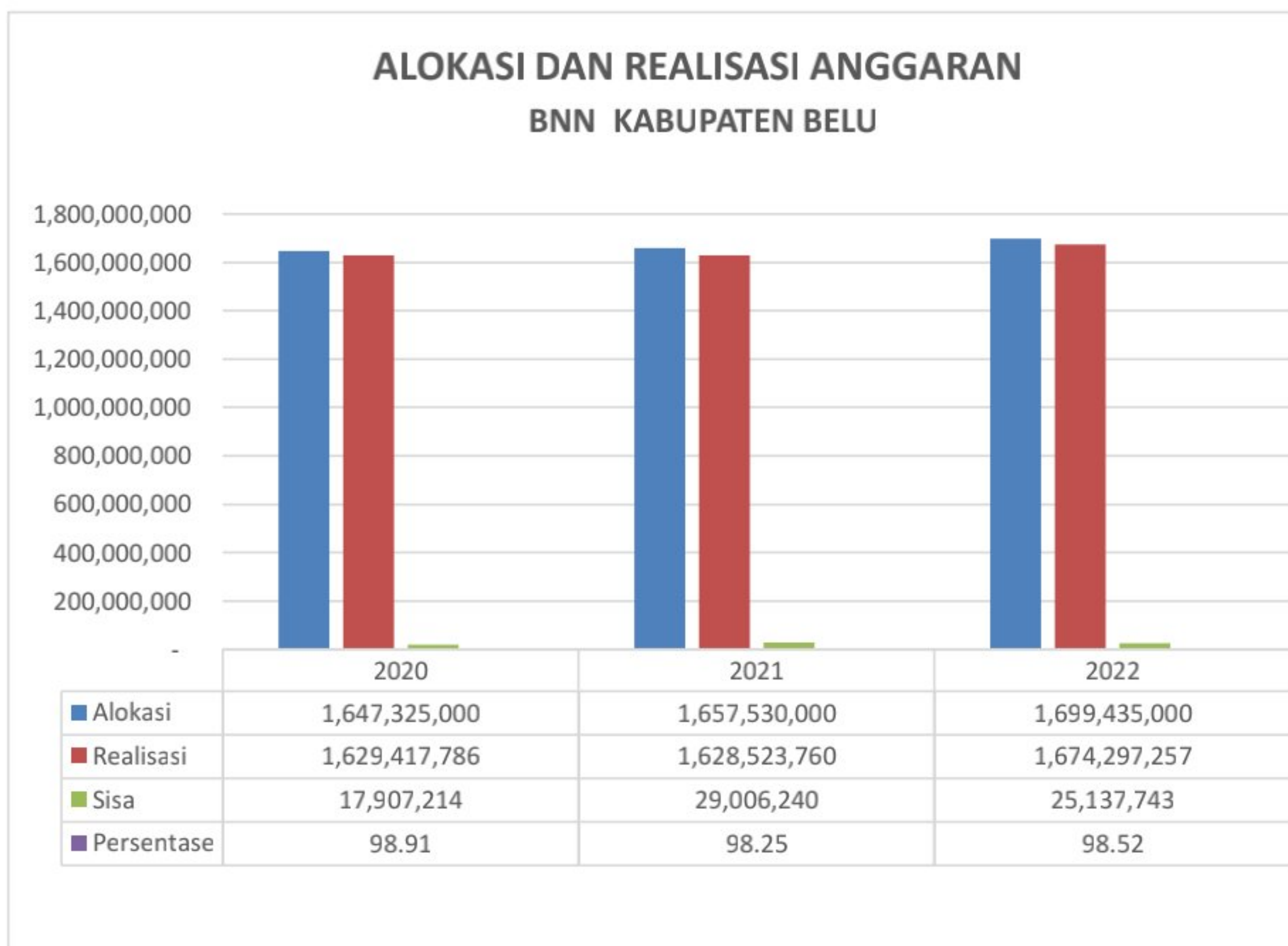


Data pembanding realisasi anggaran per masing-masing Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

#### 1. BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

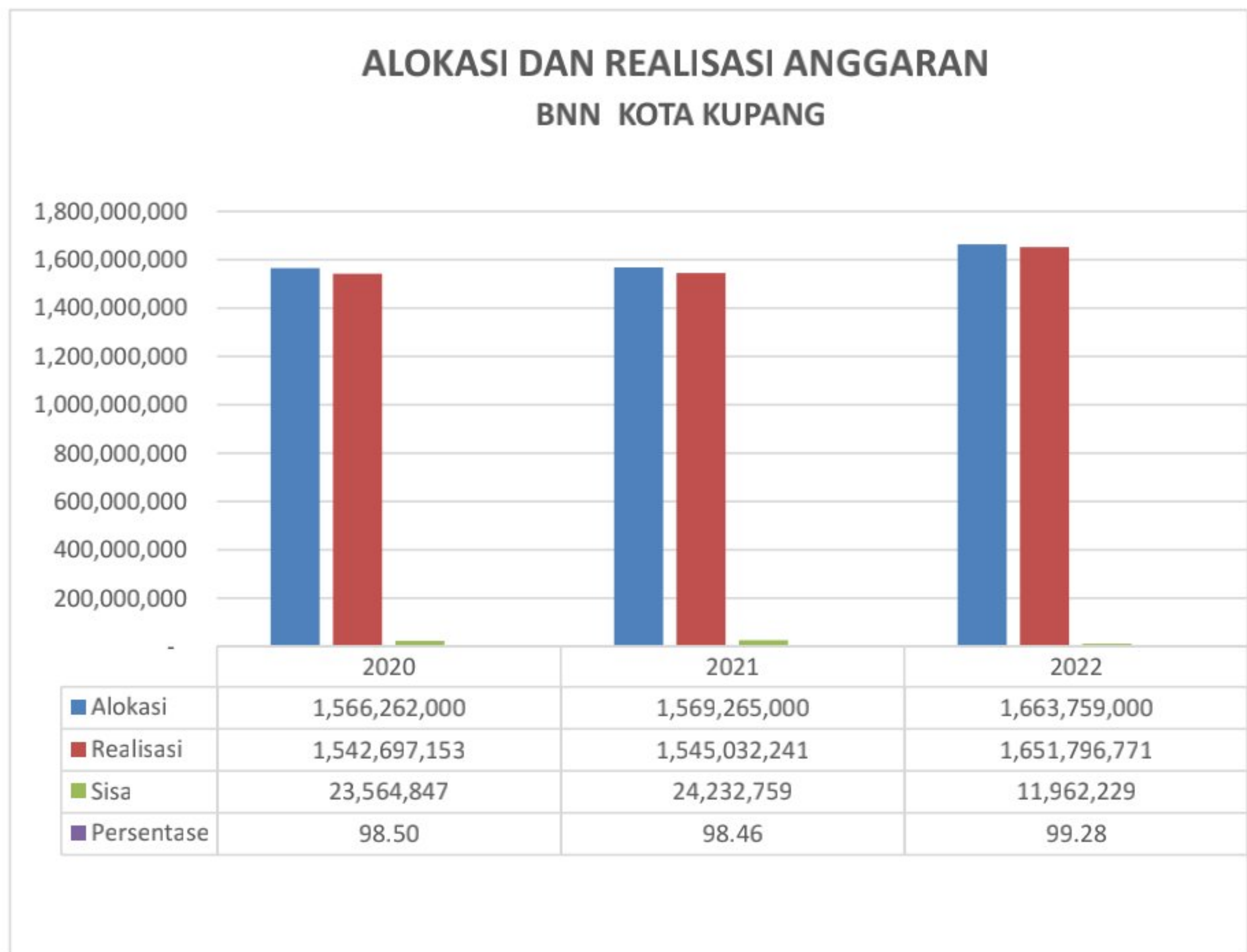


#### 2. BNN Kabupaten Belu

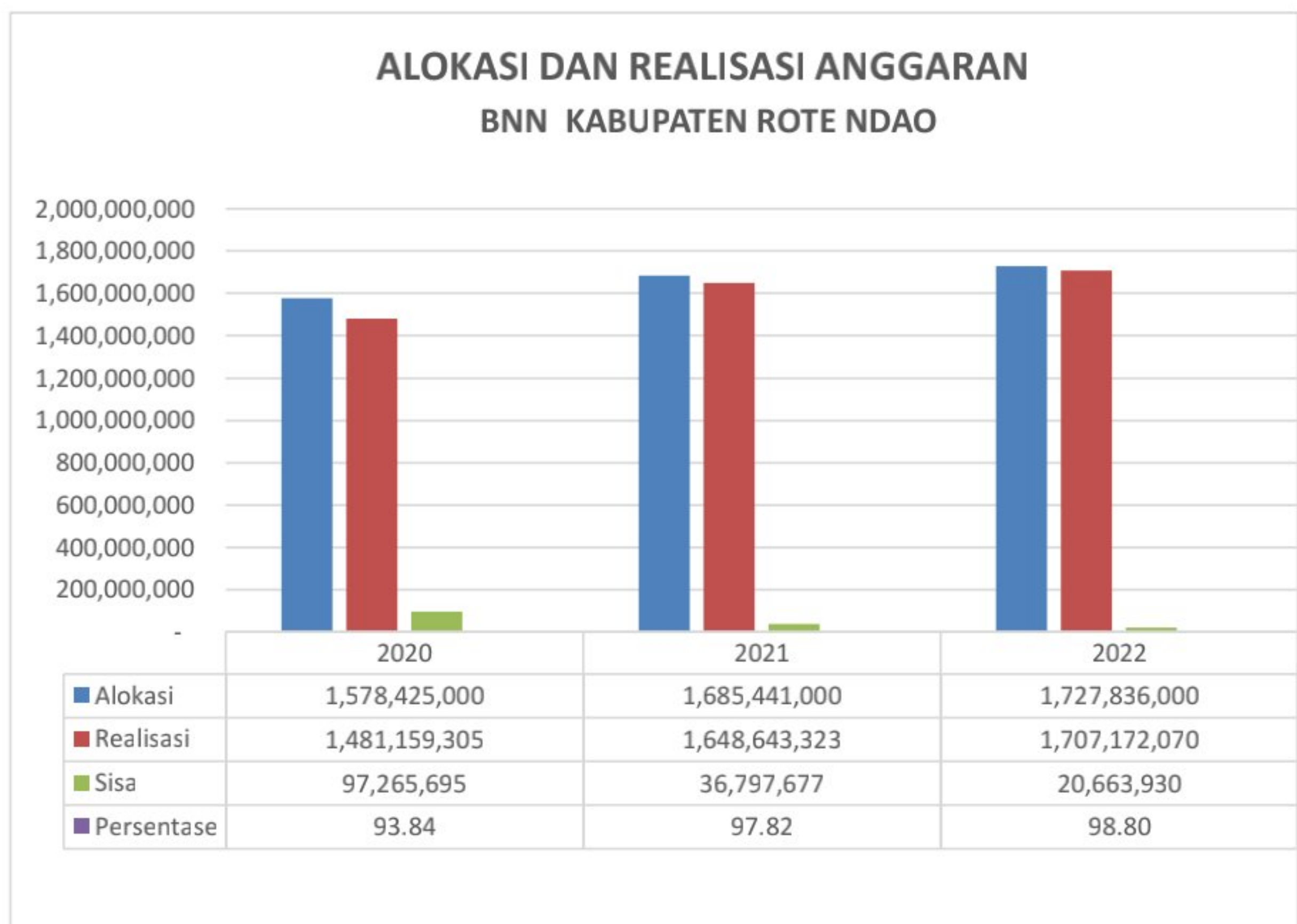




### 3. BNN Kota Kupang



### 4. BNN Kabupaten Rote Ndao





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, namun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan berbagai strategi dan upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Realisasi anggaran Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mencapai Rp.11.792.195.075,- atau 95.49 % dari Pagu Anggaran 12.348.659.000,-, dengan sisa anggaran Rp. 556.463.925,- atau setara dengan 4.51 %. Meskipun realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, namun sebagian besar sisa anggaran di Tahun 2022 sebagai bentuk efisiensi anggaran.

### B. Saran dan Masukan

1. Penguatan Sumber Daya Manusia bagi semua pegawai Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan bagi personil dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja personil untuk mendukung capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan Koordinasidan peran aktif *stakeholder* dan masyarakat dalam program P4GN di daerah.



3. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.
4. Akselerasi pembentukan kelembagaan BNNK di Provinsi Nusa Tenggara Timur di 19 (sembilan belas) Kabupaten.

Kupang, 30 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Mohammad Nasrun M., S.H., M.H.**



**LAMPIRAN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAN ANGGARAN**  
**SATKER WILAYAH BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

| Sasaran Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                          | Target      | Realisasi   | %     | Program | Anggaran    |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|--------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                     |             |             |       |         | Pagu        | Realisasi   | %      |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                                                   | 3           | 4           | 5     | 6       | 7           | 8           | 9      |
| Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba | Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi | 3 Kab/ Kota | 2 Kab/ Kota | 66.67 | P4GN    | 295.907.000 | 295.895.000 | 100.00 |
| Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba        | Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi    | 3 Kab/ Kota | 1 Kab/ Kota | 33.30 |         | 443.773.000 | 440.521.214 | 99.27  |
| Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN                                      | Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi                             | 3 Kab/ Kota | 3 Kab/ Kota | 100   |         | 847.604.000 | 842.413.050 | 99.39  |
| Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan                        | Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"                                        | 1 kawasan   | 1 kawasan   | 100   |         | 101.500.000 | 101.500.000 | 100.00 |
|                                                                                                             | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi                                                                                  | 2.99 Indeks | 3.20 Indeks | 107   |         |             |             |        |
| Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi                                                           | Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih                                                                                      | 25 Orang    | 33 Orang    | 132   |         | 252.416.000 | 247.769.500 | 98.16  |
|                                                                                                             | Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis                                                                   | 10 Orang    | 5 Orang     | 50    |         |             |             |        |



| Sasaran Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                              | Target           | Realisasi        | %     | Program                                          | Anggaran      |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                         |                                                                                                         |                  |                  |       |                                                  | Pagu          | Realisasi     | %     |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                       | 3                | 4                | 5     | 6                                                | 7             | 8             | 9     |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika                       | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi           | 3 Lembaga        | 3 Lembaga        | 100   |                                                  | 388.319.000   | 339.424.812   | 87.41 |
|                                                                                                         | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi | 5 Unit           | 5 Unit           | 100   |                                                  |               |               |       |
| Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi                               | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi                                             | 3.1 Indeks       | 3.55 Indeks      | 114   |                                                  | 57.412.000    | 43.889.000    | 76.45 |
| Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21                         | 5 berkas perkara | 0 berkas perkara | 0     |                                                  | 304.503.000   | 241.718.800   | 79.38 |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                  |                  |       |                                                  | 75.000.000    | 74.508.000    | 99.34 |
| Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika                                              | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan                                                   | 100 Indeks       | 0 Indeks         | 0     |                                                  | 90.705.000    | 37.477.250    | 41.32 |
|                                                                                                         | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika                                         | 100 Indeks       | 0 Indeks         | 0     |                                                  |               |               |       |
| Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien                                        | Nilai Kinerja Anggaran BNN                                                                              | 91 Indeks        | 87.44 Indeks     | 96.88 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya | 9.491.520.000 | 9.127.078.449 | 96.16 |



| Sasaran Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                         | Target                 | Realisasi              | %     | Program | Anggaran              |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                     |                                                                                                                    |                        |                        |       |         | Pagu                  | Realisasi             | %            |
| 1                                                                   | 2                                                                                                                  | 3                      | 4                      | 5     | 6       | 7                     | 8                     | 9            |
|                                                                     | Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target                      | 3 BNN Kabupaten / Kota | 1 BNN Kabupaten / Kota | 33.33 |         |                       |                       |              |
| Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur                                       | 95 Indeks              | 97.66 Indeks           | 102   |         |                       |                       |              |
|                                                                     | Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target | 3 BNN Kab / Kota       | 3 BNN Kab / Kota       | 100   |         |                       |                       |              |
| <b>Total</b>                                                        |                                                                                                                    |                        |                        |       |         | <b>12.348.659.000</b> | <b>11.792.195.075</b> | <b>95.49</b> |

Pagu Anggaran : Rp. 12.348.659.000,-  
 Total Realisasi Pagu Anggaran : Rp. 11.792.195.075,-  
 Prosentase : 95.49 %

Kupang, 31 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Mohammad Nasrun M.,S.H.,M.H.**



